



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 726 TAHUN 2023

TENTANG

### **PENETAPAN DATA PRIORITAS DAN DATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 679 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, data prioritas dan data pendukung merupakan hasil penentuan daftar data berdasarkan hasil koordinasi Forum Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Data Prioritas dan Data Pendukung Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Data Prioritas dan Data Pendukung sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi acuan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KETIGA : Data Prioritas dan Data Pendukung sebagaimana dimaksud diktum kesatu akan dilakukan pembaruan setiap saat melalui **satudata.polmankab.go.id** sesuai keadaan sebenarnya oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 6 Juni 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Juni 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 726 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 6 JUNI 2023

**HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEMBALI KEBUTUHAN DATA SEKTORAL  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Pendidikan dan Pengajaran</b>								
	1	Persentase APK SD/MI	√			√			T
	2	Persentase APM SD/MI	√			√			T
	3	Persentase APK SMP/MTs	√			√			T
	4	Persentase APM SMP/MTs	√			√			T
	5	Persentase angka putus sekolah SD/MI	√						T
	6	Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	√						T
	7	Persentase sekolah (SD) yang terakreditasi	√						T
	8	Persentase sekolah (SMP) yang terakreditasi	√						T
	9	Persentase sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (SD dan SMP)	√						T
	10	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang digunakan di sekolah (SD dan SMP)	√						T
	11	Rasio Siswa dengan Kelas SMP						√	T
	12	Rasio Siswa dengan Sekolah Menengah Pertama						√	T
	13	Rasio Siswa dengan Rombel SMP						√	T
	14	Rasio Siswa dengan Kelas SD						√	T
	15	Rasio Siswa dengan Sekolah Dasar						√	T
	16	Rasio Siswa dengan Rombel SD						√	T
	17	Jumlah SD Negeri dan Swasta						√	T
	18	Jumlah SMP Negeri & Swasta						√	T
	19	Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta						√	T
	20	Jumlah Siswa SD Negeri dan Swasta						√	T
	21	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS SD	√	√					T
	22	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS SMP	√	√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	23	Jumlah siswa SD berprestasi	√	√						T
	24	Jumlah siswa SMP berprestasi	√	√						T
	25	Jumlah SD Terakreditasi			√	√				T
	26	Jumlah SMP Yang Terakreditasi			√	√				T
	27	Jumlah sekolah yang melaksanakan evaluasi belajar siswa SD	√	√						T
	28	Jumlah sekolah yang melaksanakan evaluasi belajar siswa SMP	√	√						T
	29	Jumlah Kompetensi Dasar muatan lokal pendidikan dasar	√	√						T
	30	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan dasar	√	√						T
	31	Jumlah kurikulum muatan lokal yang tersusun	√	√						T
	32	Jumlah Peserta Asesment Nasional SMP Negeri dan Swasta							√	T
	33	Jumlah SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Buku							√	T
	34	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD							√	T
	35	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP							√	T
	36	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			√					T
	37	Jumlah Lulusan SD/Mi Sederajat						√		T
	38	Jumlah Siswa Baru SMP/MTs Sederajat						√		T
	39	Jumlah Peserta Asesment Nasional SD Negeri dan Swasta							√	T
	40	Jumlah Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemenuhan Buku							√	T
	41	Jumlah penyelenggara penerimaan peserta didik baru	√	√						T
	42	Jumlah jenis kebutuhan Operasional Dewan Pendidikan	√	√						T
	43	Jumlah jenis kebutuhan Operasional koordinator wilayah dan pengawas sekolah	√	√						T
	44	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan			√					T
	45	Jumlah Lomba-Lomba yang diikuti Siswa		√						T
	46	Jumlah Prestasi Lomba-Lomba yang diikuti Siswa							√	T
	47	Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama					√			T
	48	Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama					√			T
	49	Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama					√			T
	50	Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama					√			T
<b>2</b>		<b>Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan</b>								
	51	Persentase Guru SD memenuhi standar kompetensi	√							T
	52	Persentase Guru SMP memenuhi standar kompetensi	√							T
	53	Persentase tenaga kependidikan SD memenuhi standar kompetensi	√							T
	54	Persentase tenaga kependidikan SMP memenuhi standar kompetensi	√							T
	55	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (SD)	√							T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
56	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (SMP)	√							T
57	Rasio Guru dengan Siswa Sekolah Dasar							√	T
58	Rasio Guru dengan Sekolah Dasar							√	T
59	Rasio Guru dengan Siswa Sekolah Menengah Pertama							√	T
60	Rasio Guru dengan Sekolah Menengah Pertama							√	T
61	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	SD		√					T
62	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			√					T
63	Jumlah data pendidik	√	√						T
64	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			√					T
65	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi	√	√						T
66	Jumlah guru dan tenaga Kependidikan yang berprestasi	√	√						T
67	Jumlah Guru, Pengawas dan Kepala SMP berprestasi							√	T
68	Jumlah guru SD yang telah menyelesaikan Magang	√	√						T
69	Jumlah guru SMP yang telah menyelesaikan Magang	√	√						T
70	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	SD		√					T
72	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang lolos seleksi substantif Kepala Sekolah	√	√						T
73	Jumlah peserta yang berhasil menyelesaikan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	√	√						T
74	Jumlah Guru Penerima Tunjangan Khusus SMP							√	T
75	Jumlah Pelatihan Guru SMP yang dilaksanakan							√	T
76	Jumlah Pengawas SMP							√	T
77	Jumlah Guru Penerima Tunjangan Fungsional Non PNS SMP							√	T
78	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	SMP		√					T
79	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	SMP		√					T
80	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			√	√				T
81	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			√					T
82	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			√					T
83	Jumlah Guru Penerima Tunjangan Fungsional Non PNS SD							√	T
84	Jumlah Guru Penerima Tunjangan Khusus SD							√	T
85	Jumlah Kepala Sekolah Dasar menurut Status Sertifikat							√	T
86	Jumlah Pelatihan Guru SD yang dilaksanakan							√	T
87	Jumlah Guru, Pengawas dan Kepala SD Berprestasi							√	T
88	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	89	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			√	√				T
	90	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			√					T
	91	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			√					T
<b>3</b>		<b>Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat</b>								
	92	Persentase APK PAUD	√							T
	93	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD	√							T
	94	Persentase tenaga pendidik PAUD yang memenuhi standar kompetensi	√							T
	95	Persentase Anak Putus Sekolah yang kembali bersekolah	√							T
	96	Jumlah Peserta Didik PAUD							√	T
	97	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD							√	T
	98	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD							√	T
	99	Jumlah Peserta didik PAUD usia 5 - 6 Tahun							√	T
	100	Jumlah gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah direhab	√	√						T
	101	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhab	√	√						T
	102	Jumlah sarana untuk proses belajar mengajar di sekolah PAUD (Alat Permainan Edukasi luar)	√	√						T
	103	Jumlah sarana untuk proses belajar mengajar di sekolah PAUD (Alat Permainan Edukasi dalam)	√	√						T
	104	Jumlah PAUD yang menerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Hibah PAUD	√	√						T
	105	Jumlah Tendik dan pengelola PAUD yang menerima insentif	√	√						T
	106	Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah di sekolah non formal	√	√						T
	107	Jumlah PKBM yang melaksanakan UNPK Paket A, B, dan C	√	√						T
	108	Jumlah Lembaga PKBM dan SKB yang menerima BOP Kesetaraan dan Hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta-Hibah Pendidikan Kesetaraan	√	√						T
	109	Jumlah ketetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	√	√						T
	110	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang telah mengikuti DIKLAT							√	T
	111	Jumlah Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak menurut Status Sertifikasi							√	T
	112	Jumlah Penilik PAUD dan Dikmas							√	T
	113	Jumlah Tenaga Pendidik Penerima Tunjangan Fungsional Non PNS PAUD							√	T
	114	Jumlah Tenaga Pendidik Penerima Tunjangan Khusus Taman Kanak-Kanak							√	T
	115	Jumlah Pengawas TK							√	T
	116	Jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)							√	T
	117	Jumlah LKP (Lembaga Kursus dan pelatihan)							√	T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
118	Jumlah Warga Belajar PKBM							√	T
119	Jumlah Warga Belajar LKP							√	T
120	Jumlah Tutor Pendidikan Masyarakat							√	T
121	Jumlah Lembaga Dikmas Ter-Akreditasi							√	T
122	Jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) Usia 7-18 Tahun							√	T
123	Jumlah Sarana & prasarana PAUD yang tersedia							√	T
124	Jumlah Sarana & prasarana Pendidikan Masyarakat							√	T
125	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi			√	√				T
126	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			√	√				T
127	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan			√	√				T
128	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD			√					T
129	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			√					T
130	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang			√					T
131	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi			√					T
132	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			√					T
133	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan			√					T
134	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			√					T
135	Jumlah pendidik (Tutor) pada satuan pendidikan kesetaraan			√					T
136	Jumlah pendidik (Tutor) pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			√					T
137	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			√					T
138	Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						√		
139	Jumlah Guru (Pendidik) Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						√		
140	Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						√		
141	Jumlah Sarana & prasarana PAUD yang tersedia		√						T
142	Jumlah Sarana & prasarana Pendidikan Masyarakat							√	T
<b>4</b>	<b>Bidang Sarana &amp; Prasarana</b>								
143	Persentase sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	√							T
144	Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	√							T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
145	Jumlah ruang kelas baru	√	√						T
146	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU baru	√	√						T
147	Jumlah UKS baru	√	√						T
148	Jumlah Perpustakaan Sekolah baru	√	√						T
149	Jumlah laboratorium baru	√	√						T
150	Jumlah rumah dinas baru	√	√						T
151	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah baru	√	√						T
152	Jumlah Ruang Kelas yang telah direhab	√	√						T
153	Jumlah Ruang Guru yang telah direhab	√	√						T
154	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhab	√	√						T
155	Jumlah laboratorium yang telah direhab	√	√						T
156	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah direhab	√	√						T
157	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhab (Toilet)	√	√						T
158	Jumlah sarana untuk proses belajar mengajar di sekolah (Media Pembelajaran)	√	√						T
159	Jumlah sarana untuk proses belajar mengajar di sekolah (peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK))	√	√						T
160	Jumlah sarana untuk belajar mengajar di sekolah (Alat Laboratorium IPA Fisika)	√	√						T
161	Jumlah sarana untuk belajar mengajar di sekolah (Alat Laboratorium IPA Biologi)	√	√						T
162	Jumlah Perpustakaan SMP		√						T
163	Jumlah Ruang Kelas SMP		√						T
164	Jumlah Laboratorium SMP		√						T
165	Jumlah Rumah Dinas SMP		√						T
166	Jumlah Sanitasi SMP							√	T
167	Jumlah Rumah Ibadah SMP							√	T
168	Jumlah Rumah Ibadah SMP Yang Direhab								
169	Jumlah SMP dengan Akses Fasilitas Tertentu (Komputer, Internet)							√	T
170	Jumlah SMP dengan Lahan Milik Pemerintah							√	T
171	Jumlah SMP dengan Lahan Milik Non-Pemerintah							√	T
172	Jumlah Sekolah SMP/MTs dalam Kondisi Baik						√		T
173	Persentase sarana dan prasarana sekolah dasar dalam kondisi baik	√							T
174	Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik	√							T
175	Jumlah ruang kelas baru	√	√						T
176	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU baru	√	√						T
177	Jumlah UKS baru	√	√						T
178	Jumlah Perpustakaan Sekolah baru	√	√						T
179	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah baru	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	180	Jumlah rumah dinas baru	√	√						T
	181	Jumlah Ruang Kelas yang telah direhab	√	√						T
	182	Jumlah ruang Kepala Sekolah yang telah direhab	√	√						T
	183	Jumlah ruang guru yang telah direhab	√	√						T
	184	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhab	√	√						T
	185	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhab	√	√						T
	186	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhab	√	√						T
	187	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	√	√						T
	188	Jumlah perlengkapan Sekolah yang tersedia	√	√						T
	189	Jumlah peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	√	√						T
	190	Jumlah Perpustakaan SD		√						T
	191	Jumlah Ruang Kelas SD		√						T
	192	Jumlah Laboratorium SD		√						T
	193	Jumlah Rumah Dinas Guru SD		√						T
	194	Jumlah Sanitasi SD							√	T
	195	Jumlah SD dengan Akses Fasilitas Tertentu (Komputer, Internet)							√	T
	196	Jumlah SD dengan Lahan milik Pemerintah							√	T
	197	Jumlah SD dengan Lahan Milik Non-Pemerintah							√	T
	198	Jumlah Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik						√		T
<b>5</b>		<b>Bidang Kebudayaan</b>								
	199	Persentase Budaya daerah yang aktif dikembangkan	√							T
	200	Persentase situs Cagar Budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	√							T
	201	Persentase situs cagar budaya yang lestari	√							T
	202	Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan	√							T
	203	Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi	√							T
	204	Persentase kesenian tradisional yang lestari	√							T
	205	Persentase kesenian daerah yang aktif dan berkembang	√							T
	206	Persentase benda pusaka serta alat-alat tradisi dan kesenian yang dilestarikan	√							T
	207	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi					√			T
	208	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi					√			T
	209	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni					√			T
	210	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah					√			T
	211	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)					√			T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
212	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni					√			T
213	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat					√			T
214	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	√	√						T
215	Jumlah benda pusaka dan alat kesenian yang dikoleksi	√	√						T
216	Jumlah Situs Cagar Budaya		√						T
217	Jumlah Benda Situs Cagar Budaya						√		T
218	Jumlah Penjaga Makam						√		T
219	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang telah terdaftar dan ditetapkan						√		T
220	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)			√					T
221	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			√					T
222	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			√					T
223	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			√					T
224	Jumlah cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) yang diregister			√					T
225	Jumlah Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan			√					T
226	Jumlah tim pendaftaran cagar budaya			√					T
227	Jumlah tim ahli cagar budaya provinsi			√					T
228	Jumlah kegiatan fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			√					T
229	Jumlah pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman			√					T
230	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota			√					T
231	Jumlah sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman yang disediakan			√					T
232	Jumlah budaya tradisi yang lestari	√	√						T
233	Jumlah peserta yang menyelesaikan workshop kesenian tradisional	√	√						T
234	Jumlah seni budaya tradisional yang dikembangkan dalam pagelaran seni	√	√						T
235	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan						√		
236	Jumlah Sanggar / Komunitas Seni						√	√	T
237	Jumlah Alat Musik Tradisional							√	T
238	Jumlah Kesenian Daerah		√						T
239	Jumlah Pelaku Seni		√						T
240	Jumlah Pemerhati Budaya		√						T
241	Jumlah Kuliner Tradisional							√	T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
	242	Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat					√		T
	243	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya						√	T
	244	Jumlah Organisasi/kelompok kesenian/kebudayaan yang dibina						√	T
	245	Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya						√	T
<b>DINAS KESEHATAN</b>									
<b>1</b>		<b>Bidang Kesehatan Masyarakat</b>							
	1	Indeks Kepuasan Layanan RS	√						T
	2	Angka Harapan Hidup	√						T
	3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)						√	
	4	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup					√		T
	5	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup					√		T
	6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun					√		T
	7	Prevalensi Stunting	√						T
	8	Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	√						T
	9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)					√		T
	10	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (%)					√		T
	11	Capaian Pelayanan KB Aktif						√	B
	12	Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan dan Dukun						√	B
	13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani						√	T
	14	Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan						√	T
	15	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :	√						T
	16	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	√						T
	17	Angka Kematian Ibu	√			√			T
	18	Angka Kematian Bayi	√			√		√	T
	19	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	√						T
	20	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	√						T
	21	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/ Kabupaten sesuai standar	√						T
	22	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	√						B
	23	Persentase UKBM Yang Aktif	√						B
	24	Persentase Kader Kesehatan dan lintas sektor yang aktif dan mandiri	√						T
	25	Persentase Desa/Kelurahan STBM	√						Tr

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
26	Persentase Sanitasi Tempat-Tempat Umum						√	Tr
27	Persentase OPD Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga						√	Tr
28	Jumlah Penduduk usia >60 tahun yang memperoleh skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	√						T
29	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	√						T
30	Jumlah Penduduk Lansia yang memperoleh pembinaan kemandirian	√						T
31	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√					B
32	Jumlah Capaian Pelayanan K1						√	B
33	Jumlah Capaian Pelayanan K4						√	B
34	Jumlah Capaian Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan						√	B
35	Jumlah Capaian Pelayanan Nifas Oleh Tenaga Kesehatan						√	B
36	Jumlah Capaian Pelayanan Komplikasi Obstetri						√	B
37	Jumlah Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√					B
38	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√					B
39	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√					B
40	Jumlah peserta KB aktif yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√					B
41	Jumlah Lahir Hidup						√	
42	Jumlah Kematian Bayi						√	√
43	Jumlah Neonatal Pertama				√			B
44	Jumlah Neonatal Lengkap				√			B
45	Jumlah Penjarangan Anak Sekolah SD						√	T
46	Jumlah Penjarangan Anak Sekolah SMP						√	T
47	Jumlah Penjarangan Anak Sekolah SMA						√	T
48	Jumlah Balita Gizi Buruk				√		√	B
49	Jumlah Balita Gizi Kurang						√	
50	Jumlah Balita Dibawah Garis Merah (BGM)						√	√
51	Jumlah Balita Stunting				√			B
52	Jumlah Balita Kurus yang tertangani	√	√					B
53	Jumlah Balita						√	B
54	Jumlah Balita Ditimbang						√	B
55	Jumlah Ibu Hamil Anemia Per Puskesmas				√			B
56	Jumlah Kelahiran Hidup Per Puskesmas				√			B
57	Jumlah Kelahiran Mati Per Puskesmas				√			B
58	Jumlah Bayi Usia 0-6 BI Yang Mendapat ASI Eksklusif				√			B
59	Jumlah Kelompok Pra Konsepsi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	√	√					B
60	Jumlah Posbindu yang aktif melakukan pelayanan	√	√					B

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
61	Jumlah Lansia Tingkat Kemandirian A,B,C							√	B
62	Jumlah Posyandu Lansia yang Aktif							√	B
63	Jumlah Tenaga yang Mendapatkan Pelatihan Lansia dan Geriatri							√	B
64	Jumlah Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	√	√						B
65	Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan PHBS	√	√						B
66	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan Standar	√	√		√				Tr
67	Jumlah Kasus Bunuh Diri				√				T
68	Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat	√	√						B
69	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan ibu hamil			√					T
70	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			√					T
71	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan bayi baru lahir			√					T
72	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan balita sesuai standar			√					T
73	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			√					T
74	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			√					T
75	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			√					T
76	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			√					T
77	Jumlah Posyandu strata Mandiri	√	√						T
78	Jumlah Posyandu					√	√		T
79	Jumlah kelurahan/desa siaga						√		B
80	Jumlah Kelurahan/Desa Siaga Aktif						√	√	B
81	Jumlah Strata Posyandu							√	B
82	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan							√	B
83	Jumlah Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)							√	Tr
84	Jumlah desa yang melaksanakan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	√	√						Tr
85	Jumlah Desa ODF / Desa Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (SBS)	√	√						Tr
86	Jumlah Keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarsi)	√	√						Tr
87	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe)	√	√						Tr
88	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan memperoleh pembinaan	√	√						Tr
89	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	√	√						Tr
90	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sarana Air Bersih							√	Tr

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	91	Jumlah Keluarga Akses Jamban Sehat							√	Tr
	92	Jumlah Pengawasan sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM)							√	Tr
	93	Jumlah Rumah Tangga Akses Sarana Tempat Sampah							√	Tr
	94	Jumlah Rumah Tangga Akses Sarana SPAL							√	Tr
<b>2</b>		<b>Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>								
	95	Angka kejadian malaria							√	T
	96	Tingkat kematian akibat malaria							√	T
	97	Prevalensi Kusta	√	√		√				B
	98	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi							√	T
	99	Cakupan balita pneumonia yang ditangani							√	T
	100	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD							√	T
	101	Insidens Rate kasus Zoonotik	√	√						T
	102	Insidens Rate Kasus Thypoid	√	√						B
	103	Penderita diare balita yang ditangani							√	T
	104	Jumlah Penduduk dengan Hipertensi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	√			√				B
	105	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap dan Jenis Imunisasi				√				B
	106	Jumlah Pemberian Vaksinasi pada Anak Sekolah Dasar							√	B
	107	Jumlah Desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dibawah 24 jam	√	√						Tr
	108	Jumlah desa UCI	√	√					√	Tr
	109	Jumlah Anak Umur 18-24 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Lanjutan							√	B
	110	Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√		√				Tr
	111	Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√		√				Tr
	112	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Kasus Balita Pneumonia	√	√						B
	113	Jumlah Calon Jemaah Haji yang diberikan Pelayanan Kesehatan	√	√						T
	114	Jumlah Penduduk dengan Diabetes Mellitus yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	√	√						Tr
	115	Jumlah Desa/ Kelurahan Bebas Jentik	√	√						T
	116	Jumlah Kasus Diare yang ditangani	√	√						B
	117	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B	√	√		√				B
	118	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	√	√						B
	119	Jumlah Kematian Akibat Keracunan				√				T
	120	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				√				T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	121	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			√					T
	122	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			√					T
	123	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			√					T
	124	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak						√		T
	125	Jumlah kasus TBC (baru dan lama)						√		T
	126	Jumlah Pasien TB yang meninggal						√		T
	127	Jumlah pasien TB paru BTA yang sembuh						√		T
	128	Jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan DOTS						√		T
	129	Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati						√		T
<b>3</b>		<b>Bidang Pelayanan Kesehatan</b>								
	130	Persentase Pelaporan berbasis manual dan elektronik memenuhi standar pelaporan	√							T
	131	Prersentase SPM yang mencapai target	√	√						B
	132	Jumlah Peserta BPJS						√		B
	133	Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI)	√	√		√				B
	134	Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Non Kapitasi	√	√		√				B
	135	Jumlah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap						√		B
	136	Jumlah Puskesmas Terakreditasi						√		B
	137	Jumlah Puskesmas yang terkoneksi dengan SISRUITE	√	√						B
	138	Jumlah Kasus Sepuluh Penyakit Terbanyak				√				B
	139	Jumlah FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	√	√						T
	140	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	√	√						B
	141	Jumlah FKTP yang bersinergi dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	√	√						B
	142	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			√					T
	143	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya			√					T
	144	Jumlah kunjungan rumah sakit wonomulyo	√	√						B
	145	Jumlah pelayanan Transfusi Darah yang tersedia	√	√						B
	146	Jumlah peserta yang mengikuti diklat kepalangmerahan	√	√						T
	147	Jumlah Rujukan Pasien						√		B
	148	Jumlah Kunjungan Pasien						√		B
	149	Jumlah Fasilitas Kesehatan						√		T
	150	Jumlah Rumah Sakit Umum					√	√		T
	151	Jumlah Rumah Sakit Khusus					√	√		T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
	152	Jumlah Rumah Sakit/Rumah Bersalin					√		T
	153	Jumlah Puskesmas					√	√	T
	154	Jumlah Klinik/Balai Kesehatan					√		T
	155	Jumlah Polindes					√		T
	156	Jumlah Poliklinik						√	T
	157	Jumlah Kelompok Asman TOGA dan Akpresur)						√	T
	158	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional						√	B
	159	Jumlah Pelayanan Kesehatan SPA						√	B
	160	Jumlah Penyehat Tradisional						√	B
	161	Jumlah Perencanaan dan Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan	√	√					T
	162	Target Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	√	√					T
	163	Jumlah Aplikasi dan Pelaporan yang dikelola (SPM)	√	√					T
	164	Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang di pantau pada aplikasi kawal ibu hamil	√	√					B
<b>4</b>		<b>Bidang Sumber Daya Kesehatan</b>							
	165	Presentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	√						T
	166	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	√						T
	167	Persentase Pemeriksaan Post Market Produk Industri Rumah Tangga Pangan	√						T
	168	Persentase Apotek, Toko Obat dan optikal, UMOT yang memiliki izin	√						T
	169	Persentase industri Rumah Tangga Produk Makanan dan Minuman yang memiliki izin	√						T
	170	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang memiliki izin	√						T
	171	Persentase tenaga kesehatan, masyarakat dan Lintas Sektor yang mendapatkan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	√						T
	172	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi :	√						T
	173	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ber STR (Tenaga Medis)	√						T
	174	Persentase obat memenuhi syarat					√		T
	175	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan	√	√					B
	176	Jumlah Apotek, dan Toko Obat yang dilakukan pembinaan (Sarana Toko Obat)	√	√					T
	177	Jumlah jenis item obat yang tersedia	√	√					B
	178	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	√	√					T
	179	Jumlah Puskesmas yang dibangun	√	√					T
	180	Jumlah Jenis sarana baru di fasilitas pelayanan kesehatan	√	√					T
	181	Jumlah Jenis prasarana baru pendukung pelayanan kesehatan	√	√					T
	182	Jumlah Prasarana baru Fasilitas Pelayanan RS	√	√					T
	183	Jumlah Distribusi Obat Kabupaten						√	B

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
184	Jumlah Kefarmasian/ Penggunaan Obat Rasional (POP)							√	B
185	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	√	√						B
186	Jumlah Jenis Alat Kesehatan baru di Rumah Sakit	√	√						B
187	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	√	√						B
188	Jumlah alkes yang telah dikalibrasi	√	√						B
189	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	√	√						T
190	Jumlah Tenaga Kesehatan yang terlatih	√	√		√				T
191	Jumlah Gedung Pelayanan RS/Fasilitas Kesehatan yang terbangun	√	√						T
192	Jumlah Sarana dan Prasarana RS yang berfungsi dengan baik	√	√						T
193	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Swasta							√	T
194	Jumlah Rekomendasi / Izin yang dikeluarkan / diterbitkan							√	T
195	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal			√					T
196	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar			√					T
197	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar			√					T
198	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			√					T
199	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			√					T
200	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar untuk orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			√					T
201	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar untuk warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			√					T
202	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			√					T
203	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			√					T
204	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			√					T
205	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			√					T
206	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			√					T
207	Jumlah Tenaga Kesehatan					√			T
208	Jumlah Kasus Penyakit					√			T
209	Jumlah Tenaga Medis						√		T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Sumber Daya Air</b>								
1	Indeks Infrastruktur	√							T
2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	√							T
3	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik						√		T
4	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik			√					T
5	Persentase panjang jaringan irigasi skunder kondisi baik			√					T
6	Persentase panjang jaringan irigasi tersier kondisi baik			√					T
7	Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten							√	T
8	Jumlah jaringan irigasi kondisi baik	√							T
9	Jumlah bendung yang telah ditingkatkan	√	√						T
10	Panjang saluran irigasi yang telah direhabilitasi	√	√						T
11	Jumlah bendung irigasi yang berfungsi dengan baik	√	√				√		T
12	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik						√		T
13	Panjang keseluruhan saluran irigasi						√		T
14	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun					√			T
15	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi					√			T
16	Panjang Jaringan Irigasi yang Dipelihara							√	T
17	Jumlah laporan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi	√	√						T
18	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)			√					T
19	Panjang sungai kewenangan kabupaten							√	T
20	Panjang sungai yang terpelihara	√	√						T
21	Panjang sungai kewenangan daerah yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya					√			T
22	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			√					T
23	Panjang garis pantai							√	T
24	Jumlah pengaman pantai pada wilayah sungai kondisi baik	√							T
25	Panjang bangunan perkuatan tebing yang terbangun	√	√						T
26	Jumlah Pintu Air dalam kondisi baik						√		
27	Jumlah Pintu Air yang dibutuhkan							√	T
28	Jumlah Pintu Air yang dipelihara							√	T
29	Jumlah Rata-Rata Debit Bendung							√	B
30	Jumlah laporan polisi khusus sumber daya air	√	√						T
31	Jumlah unit pengelola teknis daerah pengelola sumber daya air (UPTD PSDA)	√	√						T
32	Jumlah Dokumen Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	33	Jumlah Dokumen Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			√					T
2		<b>Bidang Bina Marga</b>								
	34	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	√				√			T
	35	Panjang jalan kabupaten kondisi mantap	√					√		T
	36	Panjang jalan kabupaten yang terbangun	√	√	√					T
	37	Panjang jalan kabupaten yang telah direhabilitasi	√	√	√					T
	38	Panjang jalan kabupaten yang telah dipelihara	√	√	√					T
	39	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota			√					T
	40	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)			√					T
	41	Panjang jalan yang dipelihara			√					T
	42	Panjang Kondisi Ruas Jalan Kabupaten (Baik, Sedang, Rusak Ringn, Rusak Berat)						√	√	T
	43	Panjang Jenis Permukaan Ruas Jalan Kabupaten (Aspal, Beton, Kerikil, Tanah)							√	T
	44	Jumlah data dan informasi hasil survei jalan dan jembatan	√	√						T
	45	Persentase jembatan dalam kondisi baik	√							T
	46	Jumlah Jembatan kabupaten yang terbangun	√	√	√					T
47	Jumlah jembatan yang telah direhabilitasi	√	√	√					T	
48	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan			√					T	
49	Panjang jembatan yang dipelihara			√					T	
3		<b>Bidang Cipta Karya</b>								
	50	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	√							T
	51	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	√							T
	52	Persentase Jalan Lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	√							T
	53	Persentase pelayanan akses air minum	√			√				T
	54	Persentase akses sanitasi yang layak;	√			√				T
	55	Persentase akses sanitasi yang aman	√			√				T
	56	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak (%)					√			T
	57	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman (%)					√			T
	58	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)					√			T
	59	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)					√			T
	60	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	√							T
	61	Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	√					√		T
	62	Panjang drainase yang terbangun	√	√						T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
63	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain			√					T
64	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			√					T
65	Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan yang terbangun						√	√	T
66	Panjang Jalan Non Status/Jalan Lingkungan kondisi baik							√	T
67	Jumlah penerima manfaat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√							T
68	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak	√			√		√		T
69	Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun	√	√						T
70	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun	√	√						T
71	Jumlah Lumpur Tinja yang terangkut	√	√						T
72	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan							√	T
73	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi kondisi baik							√	T
74	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Berkualitas (Layak)							√	T
75	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak							√	T
76	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			√					T
77	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			√					T
78	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja			√					T
79	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja			√	√				T
80	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik			√					T
81	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan			√					T
82	Jumlah prasarana pengolahan lumpur tinja yang disediakan			√					T
83	Jumlah rumah yang tersambung ke IPALD yang disediakan			√					T
84	Jumlah jasa penyedotan lumpur tinja yang disediakan			√					T
85	Jumlah bangunan gedung kantor kondisi baik	√							T
86	Jumlah Unit bangunan gedung kantor yang terbangun	√	√						T
87	Jumlah Rehabilitasi Gedung							√	T
88	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung yang ditetapkan (Ada/Tidak)			√					T
89	Jumlah Dokumen Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung yang ditetapkan (Ada/Tidak)			√					T
90	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			√					T
91	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	92	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			√					T
	93	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat			√					T
	94	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal					√			T
	95	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat					√			T
	96	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)					√			T
	97	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)					√			T
	98	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)					√			T
	99	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)					√			T
	100	Jumlah truk tinja (unit)					√			T
	101	Jumlah penduduk berakses air minum layak						√		T
<b>4</b>		<b>Bidang Bina Konstruksi</b>								
	102	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terampil	√	√	√					T
	103	Jumlah tenaga jasa konstruksi mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Pelatihan			√					T
	104	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	√							T
	105	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	√	√	√					T
	106	Jumlah jenis sistem informasi jasa konstruksi	√	√						T
	107	Jumlah penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir			√					T
	108	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota			√					T
	109	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN			√					T
	110	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			√					T
	111	Jumlah ketersediaan data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			√					T
	112	Jumlah ketersediaan data dan profil OPD suburusan jasa konstruksi kabupaten/kota			√					T
	113	Jumlah ketersediaan data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			√					T
	114	Jumlah ketersediaan data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	115	Jumlah ketersediaan data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota			√					T
	116	Jumlah ketersediaan data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			√					T
	117	Jumlah Pengadaan Alat Lab. Bahan Bangunan Konstruksi						√		T
<b>5</b>		<b>Bidang Penataan Ruang</b>								
	118	Jumlah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang telah ditetapkan	√							T
	119	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan	√	√						T
	120	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kebijakan Penataan Ruang	√	√						T
	121	Jumlah PBG (Peretujuan Bangunan Gedung) yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting								T
	122	Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	√							T
	123	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	√							T
	124	Jumlah pelanggaran tata ruang yang terselesaikan	√	√						T
	125	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung						√		T
	126	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota					√			T
	127	Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang					√			T
	128	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota					√			T
	129	Jumlah tempat ibadah						√		T
	130	Jumlah Bangunan						√		T
	131	Jumlah Bangunan ber-PBG						√		T
<b>DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Perumahan</b>								
	1	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	√							T
	2	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	√							T
	3	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	√							T
	4	Persentase rumah yang terbangun dan atau direhabilitasi	√							T
	5	Jumlah PSU yang terbangun di Perumahan Formal	√		√					T
	6	Jumlah hunian Rusunawa	√	√						T
	7	Jumlah Perumahan Formal bersubsidi yang memiliki PSU yang memadai	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	8	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU	√	√						T
	9	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			√					T
	10	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum (Perumahan)			√					T
	11	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan (Perumahan)			√					T
	12	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) (Perumahan)			√					T
	13	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			√					T
	14	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU (Perumahan)			√					T
	15	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			√					T
	16	Jumlah pengembang yang terregistrasi			√					T
	17	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			√					T
	18	Jumlah Rumah Layak Huni	√							T
	19	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun	√	√	√					T
	20	Jumlah rumah yang terbangun/direhabilitasi bagi korban bencana dan relokasi	√	√						T
	21	Jumlah Pengembangan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni			√					T
	22	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni			√					T
	23	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			√					T
	24	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			√					T
	25	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			√					T
	26	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			√					T
	27	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			√					T
	28	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			√					T
	29	Jumlah unit Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH )			√					T
	30	Jumlah rumah yang tidak dihuni (Perumahan)			√					T
	31	Jumlah rumah pembangunan baru			√					T
	32	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni					√			T
	33	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah					√			T
	34	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni					√			T
	35	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas					√			T
	36	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar					√			T
	37	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani						√		T
<b>2</b>		<b>Bidang Permukiman</b>								

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	38	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pemukiman (Drainase, Rabat Beton, MCK, Talud, dll)								T
	39	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			√					T
	40	Luasan Kawasan Kumuh	√		√					T
	41	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	√							T
	42	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman	√	√						T
	43	Luas kawasan kumuh yang tertangani	√	√						T
	44	Luas Permukiman Kumuh						√		
	45	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu					√	√		T
	46	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota					√			T
<b>3</b>	<b>Bidang Pertanian</b>									
	47	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	√							T
	48	Luas Kebutuhan Tanah yang direncanakan untuk pembangunan	√							T
	49	Luas Tanah yang disiapkan untuk pembangunan	√	√						T
	50	Luas tanah yang terdata	√	√						T
	51	Luas Tanah yang bersertifikat	√	√						T
	52	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			√					T
	53	Jumlah SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek			√					T
	54	Jumlah SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee			√					T
	55	Jumlah Dokumen Izin membuka tanah			√					T
	56	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota			√					T
	57	Jumlah Sengketa Tanah yang terselesaikan	√	√						T
	58	Jumlah Usulan Pensertifikatan HPI							√	T
	59	Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Reforma Agraria dalam rangka Mengurangi Ketimpangan Kepemilikan Tanah					√			T
	60	Jumlah Daerah yang Menyardingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria					√			T
	61	Jumlah Daerah yang Menetapkan Perda terkait Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi dengan Lampiran Delineasi Peta Tanah Adat					√			T
	62	Jumlah sertifikat Hak Milik						√		T
	63	Jumlah sertifikat Hak Guna Pakai						√		T
	64	Jumlah sertifikat hak guna bangunan						√		T
	65	Konflik tanah yang ditindaklanjuti						√		T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD		
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>										
<b>1</b>	<b>Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan</b>									
	1	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	√							T
	2	Jumlah perda yang disosialisasikan	√	√						T
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			√		√			T
	4	Jumlah potensi Pelanggaran perda dan Perbup yang terawasi	√	√						T
	5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada					√			T
	6	Jumlah Penanganan kasus Pelanggaran Perda yang disidik dan ditindaklanjuti	√	√						B
	7	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati						√	√	B
	8	Jumlah Kasus Pelanggaran Yang Ditindak Lanjuti PPNS							√	B
	9	Jumlah Pemenuhan PPNS di Satpol PP sesuai Rasio					√			T
10	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA						√			
<b>2</b>	<b>Bidang Ketertiban Umum &amp; Ketenteraman Masyarakat</b>									
	11	Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	√							T
	12	Jumlah gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan baik	√	√						B
	13	Jumlah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam Operasi Pekat Kerjasama TNI/Polri	√	√						T
	14	Jumlah Pelaksanaan Patroli gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	√	√						B
	15	Jumlah Penindakan atas gangguan Keamanan dan Ketertiban dan Ketertiban Umum	√	√						B
	16	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa/Kerusuhan Massa							√	B
	17	Jumlah Penertiban Pelanggaran Perda/Perbup/Kebijakan Bupati dan Pelanggaran Ketertiban Umum							√	B
	18	Jumlah Operasi Pekat Satuan Polisi Pamong Praja							√	B
	19	Jumlah Pemantauan Ketertiban Masyarakat & Pengamanan Wilayah							√	B
	20	Jumlah Demonstrasi Bidang Politik						√		B
	21	Jumlah Demonstrasi Bidang Ekonomi						√		B
	22	Jumlah Demonstrasi Kasus Pemogokan Kerja						√		B
	23	Jumlah Pengaduan Masyarakat							√	B
	24	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan Petugas Trantib Lainnya							√	B
	25	Jumlah Hasil kordinasi dengan Instansi Terkait Perihal Pelaksanaan Kegiatan Trantibum							√	B
26	Jumlah Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum			√				√	B	
<b>3</b>	<b>Bidang Sumber Daya Aparatur</b>									
	27	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Teknis	√							T
	28	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	√	√						T
29	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Peningkatan Kapasitas PPNS	√	√						T	

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	30	Jumlah Petugas Polisi Pamong Praja							√	T
	31	Jumlah Petugas Polisi Pamong Praja Yang Telah mengikuti Pelatihan Dasar							√	T
	32	Jumlah Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja							√	T
	33	Jumlah Petugas Polisi Pamong Praja Yang Telah mengikuti Bimbingan Teknis Fungsional							√	T
<b>4</b>		<b>Bidang Perlindungan Masyarakat</b>								
	34	Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	√							T
	35	jumlah kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	√	√						T
	36	Jumlah peserta pelatihan Linmas	√	√						T
	37	Jumlah dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat							√	T
	38	Jumlah Ketersediaan aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			√				√	T
<b>5</b>		<b>UPTD Damkar</b>								
	39	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	√							T
	40	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			√					T
	41	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	√							T
	42	Jumlah kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran	√	√						B
	43	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri	√	√						T
	44	Jumlah ketersediaan pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			√					T
	45	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			√					T
	46	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			√					T
	47	Jumlah Petugas Damkar							√	T
	48	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			√					T
	49	Jumlah peserta pelatihan Pemadam Kebakaran	√	√						T
	50	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			√					T
	51	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran						√		T
	52	Jumlah Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit						√		T
	53	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK						√		T

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
1	<b>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>								
	1	Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana	√						T
	2	Indeks Risiko Bencana			√	√			T
	3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			√				T
	4	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			√				T
	5	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal			√				T
	6	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			√				T
	7	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			√				T
	8	Persentase warga negara yang ikut pelatihan			√				T
	9	Jumlah Desa Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi rawan bencana	√						T
	10	Jumlah Jenis Layanan Siaga Bencana	√						T
	11	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	√	√					T
	12	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Resiko Bencana Daerah				√			T
	13	Jumlah daerah rawan bencana yang dilengkapi papan informasi rawan bencana	√	√					T
	14	Jumlah dokumen rencana kontinjensi berdasarkan jenis ancaman	√	√					T
	15	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					√		T
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					√		T	
2	<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>								
	17	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB			√				T
	18	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			√				T
	19	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			√				T
	20	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			√				T
	21	Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana	√						S
	22	Jumlah kejadian bencana yang teridentifikasi dan terverifikasi	√	√				√	S
	23	Jumlah Kejadian Bencana							S
	24	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana						√	T
	25	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana				√			S
	26	Jumlah rumah yang terkena bencana alam (Non Kebakaran)			√				S
	27	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			√				S
	28	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			√				S
	29	Jumlah Peralatan Kebencanaan Logistik						√	S
	30	Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana yang dikembangkan	√	√					T
31	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					√		T	

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
	32	Jumlah Korban Manusia yang diakibatkan Bencana Alam					√		T
	33	Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan Bencana Alam					√		T
3		<b>Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi</b>							
	34	Jumlah Survey Rehabilitasi Pasca Bencana						√	S
	35	Jumlah Survey Rekonstruksi Pasca Bencana						√	S
	36	Jumlah Kerugian Ekonomi Akibat Bencana				√			S
	37	Jumlah Pascabencana yang tertangani	√	√					T
	38	Jumlah petugas terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi					√		T
<b>DINAS SOSIAL</b>									
1		<b>Bidang Rehabilitasi Sosial</b>							
	1	Persentase PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	√						T
	2	Jumlah PMKS di LUAR PANTI yang ditangani dalam Pelayanan Sosial	√						T
	3	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang diberi keterampilan	√						T
	4	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang mendapatkan Penyediaan Permakanan	√	√					T
	5	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang memperoleh keterampilan	√	√					T
	6	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)						√	T
	7	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)						√	T
	8	Jumlah PMKS tertangani (jiwa)						√	T
	9	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)						√	T
	10	Jumlah Anak Luar LKSA/PANTI ASUHAN						√	T
	11	Jumlah Anak yang Berhadapan Hukum (ABH)						√	B
	12	Jumlah Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)						√	B
	13	Jumlah Anak Terlantar						√	T
	14	Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT)						√	T
	15	Jumlah Calon Orang Tua Angkat (COTA)						√	T
	16	Jumlah Lansia						√	T
	17	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas						√	T
	18	Jumlah Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di Luar Panti			√				T
	19	Jumlah Bantuan Pemakanan Bagi Anak Terlantar di Luar Panti			√				T
	20	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik				√			T
	21	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)				√			T
	22	Jumlah Disabilitas Netra				√			T
	23	Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasarakatan (BWBP)	√	√					T
24	Jumlah Bekas Korban Pengguna NAPZA	√	√					T	

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	25	Jumlah Waria							√	T
	26	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi							√	T
	27	Jumlah PSK(Pekerja Sosial Komersial)							√	T
	28	Jumlah Pasca Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)							√	T
	29	Jumlah Disabilitas Penerima Program Rehabilitasi Sosial							√	T
	30	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM			√					T
	31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			√					T
	32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			√					T
	33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			√					T
	34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			√					T
	35	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			√					T
	36	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			√					T
	37	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			√					T
	38	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			√					T
	39	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			√					T
	40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			√					T
	41	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			√					T
	42	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			√					T
<b>2</b>		<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>								
	43	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	√							T
	44	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Uraian Per Desa)					√			T
	45	Jumlah RUTA dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah yang valid	√							T
	46	Jumlah data Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial yang valid	√	√						T
	47	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial penerima bantuan sosial	√	√						T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD		
	48	Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial				√				T
	49	Jumlah Tenaga Relawan (TAGANA)						√		T
	50	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk			√					T
	51	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			√					T
	52	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			√					T
	53	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			√					T
	54	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia			√					T
	55	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan			√					T
	56	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			√					T
	57	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			√					T
	58	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			√					T
	59	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial			√					T
	60	Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH)				√				B
	61	Jumlah penerima PBI JKN Pusat				√				B
	62	Jumlah penerima PBI Jamkes Daerah (Rekomendasi)				√				B
	63	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki			√					T
	64	Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan					√			
<b>3</b>		<b>Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin</b>								
	65	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	√							T
	66	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yg diberdayakan	√							T
	67	Jumlah KK KAT yang mendapat fasilitas Pemberdayaan Sosial	√	√						T
	68	Jumlah Anak Putus sekolah yang dilatih keterampilan usaha	√	√						T
	69	Jumlah KUBE (APBD)						√		Tr
	70	Jumlah KUBE (APBN)						√		Tr
	71	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			√					T
	72	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			√					T
	73	Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Usaha Kesejahteraan Sosial	√							T
	74	Jumlah Kelompok dan Individu yang diberdayakan	√							T
	75	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dikelola	√	√						T
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>								
	1	Jumlah Informasi Kinerja Lingkungan hidup (DIKPLHD), KLHS, D3TLH yang disusun	√	√						T
	2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, DPLH, AMDAL/DELH)	√	√						T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD		
	3	Jumlah Rekomendasi UKL/UPL							√	T
	4	Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota			√					T
	5	Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lingkungan Yang Ditangani							√	T
	6	Jumlah Mitra/Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup							√	T
	7	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang mendapatkan pembinaan	√	√						T
	8	Jumlah Aparat Yang Ditingkatkan Kompetensinya dalam Pengelolaan Lingkungan							√	
	9	Jumlah titik pantau adipura dan lokasi proklamasi	√	√						T
	10	Jumlah Kantor/Sekolah yang mendapatkan Pembinaan dan Penilaian	√	√						T
	11	Jumlah Bank Sampah yang mendapat pembinaan	√	√						T
	12	Jumlah Rumah Kompos Yang Dibina							√	T
	13	Jumlah TPS 3R Yang Dibina							√	T
	14	Jumlah Pengepul dan Lapak Yang Dibina							√	T
	15	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup							√	T
	16	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung					√			T
	17	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup					√			T
<b>2</b>		<b>Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran</b>								
	18	Tingkat Pencemaran	√							Tr
	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	√				√			T
	20	Indeks kualitas air (IKA)			√					T
	21	Indeks Kualitas Udara (IKU)			√					T
	22	PPLHD Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya							√	T
	23	Persentase titik pantau tidak melampaui ambang batas baku mutu pencemaran	√							T
	24	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					√			
	25	Jumlah Laporan hasil Pra Asesment Laboratorium	√	√						T
	26	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan Penghasil Limbah Berbahaya	√	√						T
	27	Jumlah Jenis usaha /Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang terbina	√	√						S
	28	Jumlah jenis usaha /Kegiatan yang mendapat izin mengelola limbah dan limbah B3							√	S
	29	Jumlah permohonan berkas Izin Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang telah terverifikasi	√	√						B
	30	Jumlah pencemaran air, Udara, dan Tanah dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tertangani	√	√						B
	31	Jumlah titik kualitas air yang dipantau dan teruji				√				B
	32	Jumlah Titik Kualitas Udara yang dipantau dan teruji							√	B
	33	Jumlah Titik Kualitas Tanah yang dipantau dan teruji							√	B
	34	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan terkait pemeliharaan lingkungan	√	√						Tr

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	35	Jumlah Lokasi Proklamasi Yang Terbina							√	T
	36	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca							√	T
	37	Indeks tutupan hutan (ITH)			√					T
	38	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			√					T
	39	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			√					T
	40	Pemulihan ekosistem pada Tahura			√					T
	41	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			√					T
	42	Rehabilitasi Hutan dan Lahan					√			T
<b>3</b>		<b>Bidang Kebersihan dan Pertamanan</b>								
	43	Persentase sampah yang terkelola	√							T
	44	Persentase timbulan sampah yang terkelola	√							T
	45	Persentase Pengurangan Sampah	√							T
	46	Persentase Penanganan Sampah	√			√				T
	47	Persentase Ruang Terbuka Hijau	√							T
	48	Capaian Pengelolaan sampah kabupaten			√					T
	49	Jumlah Petugas Kebersihan							√	T
	50	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan							√	T
	51	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani Pengangkutan Sampah							√	T
	52	Volume Produksi Sampah			√					B
	53	Jumlah Timbulan Sampah Perkotaan yang Tertangani	√	√	√					B
	54	Jumlah Timbulan Sampah Yang Daur Ulang							√	B
	55	Jumlah sampah yang berhasil dikurangi melalui pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah	√	√						B
	56	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terkelola dengan baik	√					√		T
	57	Jumlah Taman yang terkelola	√	√						T
	58	Jumlah Tenaga Petugas Pemeliharaan & Penataan Taman							√	T
	59	Jumlah Armada Kebersihan siap beroperasi	√	√						T
	60	Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah (TPS-3R)							√	T
	61	Jumlah Sampah Yang Dikelola TPS 3R								
	62	Jumlah Bank Sampah							√	T
	63	Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON)					√			T
	64	Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah (Juta ton)					√			T
	65	Jumlah sampah yang tertangani						√		T
	66	Jumlah timbulan sampah						√		T
	67	Luas areal pelayanan						√		T
<b>4</b>		<b>UPTD TPA Sampah Binuang</b>								

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	68	Volume Sampah Yang Masuk TPA							√	B
	69	jumlah Jenis Sarana TPA							√	B
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>								
	1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	√						√	S
	2	Persentase kepemilikan kartu keluarga	√						√	S
	3	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	√	√						B
	4	Jumlah Penerbitan KTP Elektronik	√	√						B
	5	Jumlah Penerbitan SKP WNI	√	√						B
	6	Jumlah penduduk pada Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2)						√	√	S
	7	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan							√	S
	8	Jumlah Perekaman KTP-el per Kecamatan							√	B
	9	Jumlah Kepemilikan KTP-el per Kecamatan							√	S
	10	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan							√	S
	11	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan								
	12	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendaftaran penduduk	√							B
	13	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk	√	√						B
	14	Jumlah Layanan Perubahan Status dan Kewarganegaraan							√	B
<b>2</b>		<b>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</b>								
	15	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	√			√	√	√		T
	16	Jumlah Akta Kelahiran	√			√				B
	17	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Usia (0-18) Tahun				√				S
	18	Jumlah Kelahiran dan Kepemilikan Akte Kelahiran (AK) Per kecamatan				√				B
	19	Jumlah Penerbitan Akte Kelahiran Umur 0-5 Tahun							√	B
	20	Jumlah Akta Perkawinan	√	√	√					B
	21	Jumlah Akta Perceraian	√	√	√					B
	22	Jumlah peserta sidang Isbath Nikah	√	√						B
	23	Jumlah Akta Pengakuan Anak	√	√						B
	24	Jumlah Akta Pengesahan Anak	√	√						B
	25	Jumlah Akta Kematian	√	√	√					B
	26	Jumlah Perubahan Nama							√	B
	27	Jumlah Layanan Status Anak							√	B
<b>3</b>		<b>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								
	28	Jumlah NIK yang terupdate	√	√						B

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	29	Jumlah Laporan data kependudukan dan pemanfaatan	√							T
	30	Jumlah Penyajian data kependudukan			√					B
	31	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	√							T
	32	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK						√		T
<b>4</b>		<b>Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>								
	33	Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Lembaga Pengguna						√		T
	34	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data kependudukan						√		T
	35	Jumlah Inovasi Pelayanan						√		T
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa</b>								
	1	Persentase desa yang Berkembang	√							T
	2	Persentase desa yang Maju	√							T
	3	Persentase desa yang Mandiri	√							T
	4	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif						√		T
	5	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	√	√						T
	6	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	√	√						T
	7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			√					T
	8	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	√	√						T
	9	Jumlah Desa Status Sangat Tertinggal				√				T
	10	Jumlah Desa Status Tertinggal				√	√			T
	11	Jumlah Desa Berkembang					√			T
	12	Jumlah Desa Maju								T
	13	Jumlah Desa Mandiri				√	√			T
	14	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan kemasyarakatan						√		T
	15	Jumlah desa yang menyelenggarakan musrenbang desa tepat waktu	√	√						T
	16	Jumlah desa yang difasilitasi pemetaan potensi kawasan perdesaan	√	√						T
	17	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			√					T
	18	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi status perkembangan desa (IDM)	√	√						T
	19	Jumlah Alokasi Dana Desa Berdasarkan Bidang Kegiatan						√		T
	20	Jumlah Kelompok Binaan PKK						√		T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	21	Jumlah Posyandu Aktif							√	T
	22	Jumlah Karang Taruna							√	T
	23	Jumlah RT dan RW								
	24	Jumlah PAUD di Desa								
2		<b>Bidang Pemerintahan Desa</b>								
	25	Persentase desa dengan status kurang berkembang	√							T
	26	Persentase desa dengan status berkembang	√							T
	27	Persentase desa dengan status Cepat Berkembang	√							T
	28	Persentase Desa yang melakukan kerjasama Desa	√							T
	29	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	√	√						T
	30	Jumlah Desa Kurang Berkembang							√	T
	31	Jumlah Desa Berkembang					√			T
	32	Jumlah Desa Cepat Berkembang							√	T
	33	Jumlah desa yang memiliki dokumen perencanaan	√							T
	34	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama Desa	√	√	√					T
	35	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	√	√						T
	36	jumlah desa yang menyusun dokumen profil desa	√	√						T
	37	jumlah desa menyusun evaluasi perkembangan desa	√	√						T
	38	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			√					T
	39	Jumlah Desa yang desanya tertib administrasipengelolaan aset desa					√			T
	40	Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuanPermendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota					√			T
	41	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan aset	√	√						T
	42	Jumlah peraturan desa yang memenuhi kaidah penyusunan	√	√						T
43	Jumlah peraturan desa dievaluasi	√	√						T	
44	Jumlah pengawasan pemerintahan desa	√	√						T	
45	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemdes							√	T	
46	Jumlah Pagu Alokasi Dana Desa (APBD)							√	T	
47	Jumlah Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)							√	T	
3		<b>Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG</b>								
	48	Persentase BUMDesa yang Berkembang	√							T
	49	Persentase BUMDesa yang berkembang Maju	√							T
	50	Persentase BUMDesa yang berkembang Mandiri	√							T
	51	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	√							T
52	Penyertaan Modal Bumdes									

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
	53	Pendapatan Asli Desa (PAD) Bumdes							
	54	Jumlah BUMDES yang dibina dan diawasi	√						T
	55	Jumlah Bumdes						√	T
	56	Jenis Usaha Bumdes						√	T
	57	Jumlah Status Bumdes							
	58	Jumlah Status Bumdes Yang Berbadan Hukum							
	59	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes					√		T
	60	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya					√		T
	61	Jumlah Revitalisasi Bumdes Berkembang					√		T
	62	Jumlah Revitalisasi Bumdes Maju					√		T
	63	Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Berkembang					√		T
	64	Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Maju					√		T
	65	Jumlah Desa yang dibangun sarana dan Prasarananya untuk mendukung destinasi wisata					√		T
	66	Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa					√		T
	67	Jumlah Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	√						T
	68	Jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG)						√	T
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &amp; PERLINDUNGAN ANAK</b>									
<b>1</b>		<b>Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</b>							
	1	Persentase peserta KB aktif	√		√				T
	2	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)			√				T
	3	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP			√				T
	4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			√				T
	5	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan			√				T
	6	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah			√				T
	7	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)			√				T
	8	Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (Provinsi)						√	T
	9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun						√	T
	10	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			√				T
	11	Jumlah kebijakan yang terpadu	√						T
	12	Jumlah sekolah siaga kependudukan	√	√					T
	13	Jumlah pemangku kepentingan yang memperoleh pemahaman Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai peringatan Dini Dampak Kependudukan	√	√					T
	14	Banyaknya Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga						√	T
	15	Jumlah Pelayanan Kontrasepsi (Jumlah Peserta KB Baru)				√			B

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	16	Jumlah Bidan Praktek Mandiri							√	B
	17	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) menurut Kecamatan							√	T
	18	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Aktif Menurut Kontrasepsi Yang Dipakai				√				B
	19	Jumlah Pengendalian Lapangan							√	B
	20	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perda-kan			√					T
	21	Jumlah Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			√	√				T
	22	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			√					T
	23	Jumlah Kampung KB	√							T
	24	Jumlah Rumah data kependudukan yang terbentuk	√	√						T
	25	Jumlah Data dan informasi keluarga yang tersedia	√	√						T
	26	Jumlah Kegiatan kampung KB							√	B
	27	Perkembangan Kampung KB / Per kecamatan							√	B
<b>2</b>		<b>Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>								
	28	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)					√			T
	29	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berencana (KB)					√			T
	30	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)					√			T
	31	Jumlah Kader Kelompok KB yang meningkat kapasitasnya dalam Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	√							T
	32	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mencapai target penyuluhan KB	√							T
	33	Jumlah ALKON yang terdistribusi	√							T
	34	Jumlah kelompok KB yang memperoleh pemahaman Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	√	√						T
	35	Jumlah Layanan Keluarga Berencana							√	B
	36	Jumlah Ormas yang aktif dalam pelayanan dan pembinaan kesertaaan ber-KB	√							T
	37	Jumlah Keluarga yang telah terbina terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	√							T
	38	Jumlah PKB/ PLKB yang aktif dalam layanan program KKBPK	√	√						T
	39	Jumlah Akseptor KB yang terbina pasca pelayanan	√	√						T
	40	Jumlah Alat Kontrasepsi yang dimanfaatkan terhadap PUS	√	√						T
	41	Jumlah Kader Poktan yang terlatih	√	√						T
	42	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).							√	T
	43	Jumlah Kelompok UPPKS	√	√						T
	44	Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja Berbasis Sekolah							√	T
	45	Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja Berbasis Masyarakat							√	T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
	46	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK					√		T
	47	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre					√		T
<b>3</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>							
	48	Persentase Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan	√						T
	49	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			√				T
	50	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			√				T
	51	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan					√		T
	52	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	√						T
	53	Jumlah Perangkat Daerah yang responsif terhadap pengarusutamaan Gender	√						T
	54	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang aktif	√						T
	55	Jumlah lintas sektor yang terlibat aktif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	√						T
	56	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG	√	√		√			T
	57	Jumlah OPD yang aktif dalam PPRG	√	√					T
	58	Jumlah lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	√	√					T
	59	Jumlah Kekerasan Perempuan termasuk TPPO yang memerlukan perlindungan tertangani secara terpadu	√	√		√			T
	60	Jumlah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mendapatkan Layanan Penanganan secara Komprehensif				√			Tr
	61	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapatkan Layanan Penanganan secara Komprehensif						√	Tr
	62	Jumlah Kursi Yang diduduki perempuan di parlemen (DPRD)				√			T
	63	Jumlah Perempuan Yang Berada di Posisi Manajerial (Kepala OPD)				√			T
	64	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			√				T
	65	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			√				T
	66	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			√				T
67	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			√				T	
68	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			√				T	
69	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			√				T	
70	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			√				T	
71	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi			√				T	
72	Persentase Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan	√						T	

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	73	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	√							T
	74	Jumlah Forum Anak yang aktif	√	√						T
	75	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	√	√		√				T
	76	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus telah tertangani	√	√						T
	77	Jumlah Sekolah Ramah Anak						√		Tr
	78	Jumlah Puskesmas Ramah Anak						√		Tr
	79	Jumlah Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)						√		Tr
	80	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			√					T
	81	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			√					T
	82	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			√					T
	83	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			√					T
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Pengembangan Perhubungan</b>								
	1	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	√							T
	2	Jumlah Rencana Induk Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	√							T
	3	Jumlah Rencana FS Bandara dan Rencana Pembangunan Sarana fasilitas Keselamatan Jalan	√	√						T
	4	Jumlah Prasarana Transportasi dan Penyeberangan						√		T
	5	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas						√		T
	6	Jumlah Papan Nama Jalan						√		T
	7	Jumlah Dermaga dan Pelabuhan				√				T
	8	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell						√		T
	9	Jumlah Traffic Light						√		T
	10	Jumlah Warning Light						√		T
	11	Jumlah Portal Jalan						√		T
	12	Jumlah Guardrail						√		T
	13	Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik	√							T
	14	Jumlah Perlengkapan Jalan	√	√						T
	15	Jumlah Perengkapan Jalan Yang berfungsi baik	√	√						T
	16	Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Yang Dipelihara						√		T
<b>2</b>		<b>Bidang Lalu Lintas</b>								
	17	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	√							T
	18	Jumlah Titik Lokasi Parkir yang Tertib	√							T
	19	Jumlah fasilitas parkir dalam kondisi baik	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	20	Jumlah manajemen rekayasa lalu lintas	√	√						T
	21	Jumlah wilayah Rekayasa Lalu Lintas							√	T
	22	Jumlah Rekomendasi Andalalin							√	T
	23	Jumlah Lokasi Tertib lalu lintas	√							T
	24	Jumlah titik kemacetan dan rawan kecelakaan yang terkendali	√	√						T
	25	Jumlah Titik Rawan Kecelakaan							√	T
	26	Jumlah Pengamanan lalu Lintas							√	T
	27	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas							√	B
<b>3</b>		<b>Bidang Angkutan</b>								
	28	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	√							T
	29	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C			√					T
	30	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			√					T
	31	Jumlah izin trayek yang ditertibkan	√					√		T
	32	Jumlah sopir angkutan yang memiliki kompetensi mengemudi baik	√	√						T
	33	Jumlah Fasilitas Terminal yang tersedia dalam kondisi baik	√	√						T
	34	Jumlah Kendaraan yang memiliki Izin Trayek	√	√						T
	35	Jumlah Angkutan Tidak Dalam Trayek							√	T
	36	Jumlah Angkutan Penyeberangan							√	T
	37	Jumlah Angkutan Umum (angkutan Orang)							√	T
	38	Jumlah Angkutan Umum (angkutan Barang)							√	T
	39	Jumlah Kartu Kontrol Pengawasan Trayek							√	T
	40	Jumlah dokumen Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi			√					T
	41	Jumlah angkutan Umum yang di tertibkan	√							T
	42	Jumlah Angkutan Umum Keluar Masuk Terminal	√							T
	43	Jumlah Kendaraan yang telah Uji KIR	√	√	√					B
	44	Jumlah Uji KIR angkutan Umum						√		B
	45	Jumlah Kendaraan Roda Empat						√		T
	46	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			√					T
	47	Jumlah Kendaraan Bermotor					√			T
	48	Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C							√	B
	49	Jumlah penumpang angkutan umum						√		T
<b>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>								

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015			√					T
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			√					T
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			√					T
4	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota			√					T
5	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	√							T
6	Jumlah Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif	√							T
7	Jumlah perangkat daerah yang telah didukung layanan informasi Website, PPID, dan Media Sosial	√	√						T
8	Jumlah Anggota PPID Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan telah Lulus Sertifikasi				√				T
9	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	√	√						T
10	Jumlah ketersediaan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			√					T
11	Jumlah Layanan Informasi Publik						√		B
12	Jumlah Stasiun Radio/TV Lokal dan Nasional						√	√	T
13	Jumlah Surat Kabar Terbitan Lokal dan Nasional						√	√	T
14	Jumlah Pemilik Usaha TV Kabel di Kabupaten Polman							√	T
15	Jumlah Jenis Media Penyebaran Informasi Publik Penyelenggaraan Pemda							√	T
16	Jumlah Kegiatan Bupati yang Terpublikasi							√	B
17	Jumlah Kegiatan Pemda yang Terpublikasi							√	B
18	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)							√	T
19	Jumlah saluran layanan aspirasi dan pengaduan publik	√	√						T
20	Jumlah Kasus Pengaduan Publik yang Belum Ditindaklanjuti							√	B
21	Jumlah isu publik dan penyebarannya							√	B
22	Jumlah laporan pengaduan yang ditindak lanjuti							√	B
23	Jumlah website yang dikelola			√					T
<b>2</b>	<b>Bidang Teknologi, Informasi dan Persandian</b>								
24	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis Elektronik	√		√					T
25	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			√					T
26	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			√					T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
27	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			√					T
28	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah			√					T
29	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			√					T
30	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo			√					T
31	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			√					T
32	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Memanfaatkan sertifikat elektronik					√			T
33	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo					√			T
34	Persentase (%) Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat					√			T
35	Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					√			T
36	Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Genggam				√				T
37	Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Menggunakan Internet				√				T
38	Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Menggunakan Komputer (PC, Laptop, Desktop, Notebook, Tablet)							√	T
39	Jumlah instansi pemerintah yang terbentuk CSIRT K/L/D					√			T
40	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT					√			T
41	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D					√			T
42	Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung TIK	√							T
43	Jumlah kebijakan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	√	√						T
44	Jumlah sistem informasi yang didukung Sistem Keamanan Informasi Yang Memadai	√	√	√					T
45	Jumlah aplikasi e-government Kab. Polewali Mandar			√					T
46	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah							√	T
47	Jumlah Domain dan Sub Domain yang terlayani							√	T
48	Jumlah Area Yang Telah Dilakukan Pengamanan Informasi							√	T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	49	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			√					T
	50	Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	√	√						T
	51	Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani Pusat Data	√	√	√					T
	52	Jumlah Menara Telekomunikasi							√	T
	53	Jumlah Jaringan Telepon Seluler						√	√	T
	54	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner						√	√	T
	55	Jumlah Wilayah Desa Blankspot di Kabupaten Polewali Mandar							√	T
	56	Jumlah Wilayah 3T Yang Terkoneksi Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet							√	T
<b>3</b>		<b>Bidang Statistik</b>								
	57	Persentase Data sektoral yang valid	√							T
	58	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik			√					T
	59	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik			√					T
	60	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					√			T
	61	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah					√			T
	62	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)			√					T
	63	Persentase data yang dapat berbagi pakai			√					T
	64	Jumlah jenis Data Sektoral yang telah dimutakhirkan	√	√						B
	65	Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikumpulkan							√	B
	66	Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikelola							√	B
	67	Jumlah Data Sektoral Yang Dipublikasikan							√	B
	68	Jumlah Elemen Data Sektoral yang dilengkapi standar data dan metadata	√							T
	69	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun					√			T
	70	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			√					T
	71	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			√					T
	72	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			√					T
	73	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			√					T
	74	Jumlah Aplikasi Polman Satu Data Online	√	√						T
	75	Jumlah Jenis Buku Statistik yang Tersedia						√	√	T
	76	Tersedianya buku profil daerah							√	T
	77	Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik					√			T
	78	Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi					√			T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>								
	1	Jumlah Investor	√						T
	2	Nilai realisasi investasi daerah	√						T
	3	Jumlah Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai standar prosedur	√						T
	4	Jumlah Penanaman Modal yang memenuhi standar dan prosedur	√	√					Tr
	5	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√					Tr
	6	Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Nama Perusahaan						√	B
	7	Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Lokasi Proyek						√	B
	8	Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Sektor						√	B
	9	Jumlah Sektor Unggulan yang Dipromosikan	√						Tr
	10	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	√	√					Tr
	11	Jumlah pameran promosi penanaman modal yang diikuti	√	√					Tr
	12	Data Potensi Investasi Menurut Sektor						√	B
	13	Jumlah Kantor Bank dan ATM				√			T
	14	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			√				T
	15	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal			√				T
	16	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal			√				T
	17	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting			√				T
	18	Kegiatan pameran penanaman modal			√				T
	19	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal			√				T
	20	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal			√				T
	21	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal			√				T
	22	Laporan realisasi penanaman modal			√				T
	23	Jumlah Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			√				T
	24	Jumlah Kegiatan Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			√				T
25	Nilai Realisasi Penanaman Modal					√		T	
<b>2</b>	<b>Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Perizinan dan Non Perizinan</b>								
	26	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	√						T
	27	Jumlah dan Jenis Izin pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur	√						T
	28	Jumlah dokumen layanan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui elektronik	√	√					T
29	Jumlah dokumen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang memenuhi standar dan prosedur	√	√					T	

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	30	Jumlah Konsultasi dan Aduan Masyarakat yang terlayani	√	√						T
	31	Jumlah hasil evaluasi pelayanan PTSP								T
	32	Jumlah Layanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan						√		B
	33	Jumlah Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Permohonan						√		B
	34	Jumlah Penyampaian Dokumen Permohonan yang Telah Diterbitkan						√		B
	35	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota			√					B
	36	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal								
<b>3</b>		<b>Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A</b>								
	37	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	38	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan			√					
	39	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan			√					
	40	Jumlah Pelayanan Pembayaran Retribusi Perizinan dan Non Perizinan						√		B
	41	Jumlah Perizinan Sektor A yang ditinjau						√		B
	42	Jumlah Tindak Lanjut Pengelolaan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sektor A Yang Telah Memenuhi Syarat						√		B
	43	Jumlah Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Sektor A						√		B
	44	Jumlah Pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Sektor A						√		B
	45	Jumlah SK Izin Lokasi/KKPR Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota								
	46	Jumlah Izin yang belum di tetapkan Sektor A								
	47	Jumlah Realiasisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)								
	48	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditetapkan melalui SIM BG								
	49	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Kelautan dan Perikanan OSS								
	50	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Pertanian OSS								
	51	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan OSS								
	52	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Perindustrian OSS								
	53	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan OSS								
	54	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Pekerjaan Umum an Perumahan OSS								
	55	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Transportasi OSS								
	56	Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Kesehatan, Obat dan Makanan OSS								
	57	Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Pariwisata OSS								
	58	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Ketenagakerjaan OSS								
	59	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan OSS								
	60	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial OSS								

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	61	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik OSS								
	62	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS								
4		<b>Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B</b>								
	63	Jumlah Perizinan Sektor B yang ditinjau						√	B	
	64	Jumlah Tindak Lanjut Pengelolaan Dokumen Perizinan dan Non Perzinaan Sektor A Yang Telah Memenuhi Syarat						√	B	
	65	Jumlah Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Sektor B						√	B	
	66	Jumlah dokumen pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu	√	√					T	
	67	Jumlah Izin yang belum di tetapkan Sektor B								
	68	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Kelautan dan Perikanan Non OSS								
	69	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Pertanian Non OSS								
	70	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non OSS								
	71	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Perindustrian Non OSS								
	72	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS								
	73	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Pekerjaan Umum an Perumahan Non OSS								
	74	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Transportasi Non OSS								
	75	Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Non OSS								
	76	Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Pariwisata Non OSS								
	77	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Ketenagakerjaan Non OSS								
	78	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Non OSS								
	79	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS								
	80	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik Non OSS								
81	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM Non OSS									
<b>DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARAWISATA</b>										
1		<b>Bidang Pemuda</b>								
	1	Jumlah pemuda wirausaha	√		√			√	T	
	2	Jumlah pemuda yang trampil berwirausaha	√	√					T	
	3	Jumlah Marcing Band Tiplayo						√	T	
	4	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			√				T	
	5	Jumlah pemuda pelopor	√					√	T	
	6	Jumlah organisasi pemuda dan Pemuda Potensi yang aktif	√	√					T	
	7	Jumlah Organisasi Pemuda						√	√	T
	8	Jumlah Anggota Masing-Masing Organisasi						√	√	T
	9	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	10	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			√					T
	11	Jumlah Kegiatan Pemuda						√		T
	12	Jumlah Pemuda Kader						√		T
	13	Jumlah Pemuda Potensi Yang Aktif							√	
<b>2</b>		<b>Bidang Olah Raga</b>								
	14	Jumlah atlet berprestasi	√					√		T
	15	Jumlah ajang Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kab/Kota	√							Tr
	16	Jumlah lembaga Olahraga yang berkembang	√							T
	17	Jumlah klub olahraga yang memperoleh dukungan sarana dan prasarana olah raga	√	√						T
	18	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat kab/Kota	√	√						T
	19	Jumlah Atlet Setiap Cabang Olahraga POPDA							√	T
	20	Jumlah Pelatih Setiap Cabang Olahraga POPDA							√	T
	21	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan			√					T
	22	Jumlah Kelompok/Komunitas olahraga yang berkembang	√							T
	23	Jumlah jenis olahraga yang digalakkan	√	√						T
	24	Jumlah Olahraga Masyarakat							√	T
	25	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			√					T
	26	Jumlah jenis sarpras sport center dalam kondisi baik	√	√						T
	27	Jumlah sarana/prasarana yang dikelola dan dikembangkan	√	√						T
	28	Jumlah jenis sapras dalam kondisi baik	√	√						T
	29	Jumlah Organisasi Olahraga						√		T
	30	Jumlah Kegiatan Olahraga						√		T
	31	Jumlah Lapangan Olahraga						√		T
	32	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina						√		T
	33	Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina						√		T
<b>3</b>		<b>Bidang Usaha Parawisata</b>								
	34	Jumlah Pariwisata	√							B
	35	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	√			√				B
	36	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	√			√				B
	37	Jumlah sarana/prasarana yang dikelola dan dikembangkan	√							T
	38	Jumlah Fasilitas pada Objek Wisata	√							T
	39	Jumlah sarana prasarana wisata yang terkelola dengan baik	√	√						T
	40	Jumlah Jenis Sarana prasarana pariwisata dalam kondisi baik	√	√						T
	41	Jumlah Obyek Wisata						√	√	T
	42	Jumlah Kunjungan Objek Wisata Domestik dan Mancanegara						√	√	B

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	43	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata							√	T
	44	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			√					T
	45	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			√					T
	46	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota			√					T
	47	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			√					B
	48	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			√					T
	49	Jumlah Organisasi Pariwisata							√	T
	50	Jumlah Hotel, Wisma dan Penginapan dengan Jumlah Kamar, Tempat Tidur dan Tenaga Kerja Menurut Akomodasi							√	T
	51	Jumlah Biro Travel							√	T
	52	Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan							√	T
	53	Jumlah Kunjungan Hotel, Wisma dan Penginapan Wisatawan Domestik dan Mancanegara							√	B
	54	Jumlah Kunjungan Restoran, Rumah Makan dan Warung Wisatawan Domestik dan Mancanegara							√	B
<b>4</b>		<b>Bidang Promosi Parawisata</b>								
	55	Persentase Pameran/Even Promosi Wisata	√							T
	56	Jumlah Destinasi Wisata	√							T
	57	Jumlah potensi Wisata yang dipromosikan	√							T
	58	Jumlah Destinasi Wisata yang berkembang	√							T
	59	Jumlah Paket Promosi Wisata dalam Daerah & Luar Daerah yang Dilaksanakan							√	T
	60	Jumlah Event Kepariwisata							√	Tr
	61	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			√					T
	62	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten			√					T
	63	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			√					T
	64	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi			√					T
	65	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan			√					T
	66	Jumlah ajang Wisata Lokal yang berkembang	√	√						T
	67	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Komunitas Pelaku Usaha Pariwisata yang berkembang	√	√						T
	68	Jumlah Promosi Hasil Ekonomi Kreatif Parawisata yang Dilaksanakan							√	T
	69	Jumlah Promosi Hasil Ekonomi Kreatif Parawisata yang Diikuti							√	T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca</b>								
	1	Persentase komunitas literasi yang aktif di tingkat desa	√						T
	2	Persentase desa yang memiliki komunitas literasi yang aktif	√						T
	3	Persentase pemenuhan standar manajemen perpustakaan daerah yang baik	√						T
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			√				T
	5	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk			√				T
	6	Rasio perpustakaan per satuan penduduk					√		
	7	Jumlah perpustakaan yang memiliki manajemen perpustakaan baik	√	√					T
	8	Jumlah Objek Binaan Perpustakaan Kab. Polewali Mandar						√	T
	9	Jumlah Perpustakaan Daerah					√	√	T
	10	Jumlah Perpustakaan Kecamatan					√	√	T
	11	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan					√	√	T
	12	Jumlah Perpustakaan Khusus						√	T
	13	Jumlah Perpustakaan Komunitas						√	T
	14	Jumlah Perpustakaan Sekolah SD/Sederajat						√	T
	15	Jumlah Perpustakaan Sekolah SMP/Sederajat						√	T
	16	Jumlah Perpustakaan Sekolah SMA/Sederajat						√	T
	17	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi						√	T
	18	Jumlah Perpustakaan Masyarakat (Taman Baca Masyarakat)						√	T
	19	Jumlah Perpustakaan Rumah Ibadah (Mesjid dan Gereja)						√	T
	20	Jumlah Tenaga Pustakawan						√	T
	21	Jumlah peserta pembudayaan kegemaran membaca melalui cerita	√	√					T
	22	Jumlah komunitas literasi yang aktif dan berkembang	√	√					T
	23	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca						√	B
24	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			√				T	
<b>2</b>	<b>Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan</b>								
	25	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	√						T
	26	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat			√				T
	27	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			√				T
	28	Jumlah titik layanan perpustakaan rujukan	√	√					T
	29	Jumlah koleksi bahan pustaka	√	√					T
	30	Jumlah Koleksi Buku Pada Perpustakaan Keliling					√	√	T
	31	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum Daerah					√	√	T
	32	Jumlah Koleksi Judul Buku					√	√	T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	33	Jumlah Anggota Perpustakaan							√	B
	34	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling							√	B
	35	Jumlah Pemustaka Perpustakaan Umum Daerah							√	B
	36	Jumlah Pemustaka Perpustakaan Keliling							√	B
	37	Jumlah pengunjung perpustakaan						√		
<b>3</b>		<b>Bidang Kearsipan</b>								
	38	Predikat pengelolaan kearsipan	√							T
	39	Presentase pemenuhan standar tata kelola kearsipan dinamis	√							T
	40	Persentase pemenuhan standar tata kelola kearsipan statis	√							T
	41	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			√					T
	42	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			√					T
	43	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			√					T
	44	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			√					T
	45	Jumlah arsip dinamis yang terpelihara dan telah dimusnahkan	√	√						T
	46	Jumlah arsip statis yang telah diakuisisi, preservasi, dan akses arsip statis	√	√						T
	47	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya			√					T
	48	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			√					T
	49	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			√					T
	50	Jenis Klasifikasi Arsip							√	T
	51	Jumlah Kegiatan Retensi dan Pemusnahan Arsip		√						T
	52	Jumlah arsip dinamis							√	T
	53	Jumlah arsip statis							√	T
	54	Jumlah Arsip Vital							√	T
	55	Jumlah Arsip Aktif dan In Aktif							√	T
	56	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku							√	T
	57	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK			√					T
	58	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			√					T
	59	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			√					T
	60	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK			√					T
	61	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	62	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			√					T
	63	Jumlah Objek Binaan Arsip						√		T
	64	Jenis Sosialisasi Kearsipan						√		T
	65	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Pengarsipan						√		T
	66	Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B keatas				√				T
	67	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti				√				T
	68	Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD					√			T
	69	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)					√			T
	70	Jumlah SDM pengelola arsip di LKD					√			T
	71	Jumlah Box arsip					√			T
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Perikanan Budidaya</b>								
	1	Panjang Saluran Tambak Budidaya						√		T
	2	Jumlah total produksi perikanan budidaya	√							T
	3	Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar					√			T
	4	Jumlah Produksi Budidaya Tambak					√			T
	5	Jumlah Produksi Budidaya Rumput Laut					√			T
	6	Jumlah Pembudidaya Ikan kecil yang berkembang	√							T
	7	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pelatihan/ sosialisasi	√	√						T
	8	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang berkembang	√	√						T
	9	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan	√	√						T
	10	Jumlah lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	√	√						T
	11	Jumlah data kelompok pembudidayaan ikan	√	√						T
	12	Luas Lahan Budidaya air Payau						√		T
	13	Luas Lahan Budidaya air Tawar						√		T
	14	Luas Lahan Budidaya air Laut						√		T
	15	Jumlah Infrastruktur Jembatan dan Jalan Produksi Budidaya						√		T
	16	Jumlah alat/bahan karantina	√	√						T
	17	Jumlah pembudidayaan ikan yang memenuhi standar	√	√						T
	18	Jumlah Pembenihan Ikan						√		T
	19	Jumlah Jenis Hama dan Penyakit Ikan						√		S
	20	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			√					T
<b>2</b>		<b>Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir</b>						√		
	21	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	22	Luas area perikanan tangkap yang terkelola	√							T
	23	Jumlah total produksi perikanan tangkap	√							T
	24	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Komoditi Andalan						√		T
	25	Jumlah Komoditi Unggulan Perikanan Tangkap							√	T
	26	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	√							T
	27	Jumlah Jenis Sarana Penunjang/Pendukung Tempat Pelelangan Ikan	√							T
	28	Jumlah jenis sarana dan prasarana penangkapan ikan	√	√						T
	29	Jumlah Sarana Usaha perikanan Tangkap	√	√						T
	30	Jumlah data kelompok nelayan yang mempunyai sarana dan prasarana tangkap	√	√						T
	31	Jumlah nelayan kecil yang mengikuti pelatihan dan bimbingan	√	√						T
	32	Jumlah tempat pelelangan ikan	√	√						T
	33	Jumlah Pulau-Pulau							√	T
	34	Jumlah Jenis Penangkapan					√			T
<b>3</b>		<b>Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>								
	35	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	√							T
	36	Standarisasi Produk dan Non Produk Perikanan							√	T
	37	Jumlah jenis produk hasil olahan perikanan yang dipasarkan memiliki jaminan mutu yang baik	√							B
	38	Jumlah produk olahan hasil perikanan	√	√						B
	39	Jumlah Produksi Pabrik Es							√	B
	40	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan	√							B
	41	Jumlah Penyimpanan per jenis komoditi perikanan pada Cool Stroge							√	B
	42	Jumlah Jangkauan Pemasaran Hasil Perikanan							√	T
	43	Jumlah Sarana dan Prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala Mikro dan Kecil	√	√						T
<b>4</b>		<b>Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan</b>								
	44	Rata-rata pendapatan nelayan					√			T
	45	Pendapatan pembudidaya ikan					√			T
	46	Capaian produksi perikanan						√		T
	47	Capaian jumlah konsumsi ikan						√		T
	48	Cakupan Binaankelompok nelayan						√		T
	49	Produksi perikanan kelompokbinaan						√		T
	50	Produksi garam					√			T
	51	Konsumsi ikan					√			T
	52	Jumlah Teknologi Yang Diterapkan di Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan							√	T
	53	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	54	Jumlah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang memenuhi standar	√	√						T
	55	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP					√			T
	56	Jumlah kelompok nelayan						√		T
	57	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap							√	T
	58	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya							√	T
	59	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan							√	T
	60	Jumlah Kelompok Pengawas Masyarakat							√	T
	61	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok							√	T
	62	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			√					T
	63	Luas Wilayah Konservasi Penyu							√	T
	64	Jumlah hari operasional speedboat					√			T
	65	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan					√			T
<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Tanaman Pangan</b>								
	1	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	√		√					T
	2	Pembinaan kelompok pekarangan pangan lestari					√			T
	3	Luas Panen Tanaman Pangan	√					√		S
	4	Luas Lahan Pertanian menurut Kecamatan						√	√	T
	5	Luas Lahan Bukan Pertanian menurut Kecamatan						√	√	T
	6	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan							√	T
	7	Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Penggunaan Lahan							√	T
	8	Luas Tanaman Padi							√	S
	9	Luas Tanaman Palawija							√	S
	10	Luas Panen Tanaman Palawija							√	S
	11	Luas Panen Tanaman Hortikultura	√							S
	12	Luas Panen Tanaman Obat-Obatan menurut Kecamatan Jenis Tanaman	√	√						S
	13	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	√		√					B
	14	Kawasan Jagung (Luas Pertanaman Jagung)					√			T
	15	Kawasan Kedelai (Luas Pertanaman Kedelai)					√			T
	16	Kawasan Padi (Luas Pertanaman Padi)					√			T
	17	Kawasan Umbi-umbian (Luas Pertanaman Umbi-Umbian)					√			T
	18	Kawasan Cabai (Luas Pertanaman Cabai)					√			T
	19	Kawasan Bawang Merah (Luas Pertanaman Bawang Merah)					√			T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data		
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD	
	20	Kawasan Bawang Putih (Luas Pertanaman Bawang Putih)					√			T	
	21	Kawasan Sayuran (Luas Pertanaman Sayuran)					√			T	
	22	Kawasan Jeruk (Luas Pertanaman Jeruk)					√			T	
	23	Kawasan Florikultura ((Luas Pertanaman Florikultura)					√			T	
	24	Kawasan Mangga (Luas Pertanaman Mangga)					√			T	
	25	Kawasan Manggis (Luas Pertanaman Manggis)					√			T	
	26	Kawasan Pisang (Luas Pertanaman Pisang)					√			T	
	27	Kawasan Durian (Luas Pertanaman Durian)					√			T	
	28	Kawasan Buah Lainnya (Luas Pertanaman Buah Lainnya)					√			T	
	29	Jumlah produksi padi	√						√	S	
	30	Jumlah produksi jagung	√						√	S	
	31	Jumlah Produksi kedelai	√						√	S	
	32	Jumlah alat dan mesin pasca panen pertanian	√	√						T	
	33	Jumlah benih padi, jagung dan kedelai yang didistribusikan	√	√						T	
	34	Jumlah Produksi Tanaman Palawija							√	√	S
	35	Jumlah Produktivitas Tanaman Palawija							√	√	S
	36	Jumlah Pembenihan Tanaman Pangan							√		S
	37	Jumlah Produksi Buah-Buahan	√						√		S
	38	Jumlah Produksi Sayuran	√						√		S
	39	Jumlah bibit tanaman buah-buahan yang diokulasi	√	√							S
	40	Jumlah jenis bibit hortikultura	√	√							S
	41	Jumlah Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah	√	√					√		S
	42	Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura menurut Kecamatan berdasarkan Luas Lahan dan Jenis Bibit Tanaman	√	√							S
	43	Jumlah Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian yang Dikendalikan							√		S
	44	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan							√		B
	45	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan							√		B
	46	Jumlah Perangkap Babi	√	√							B
	47	Jumlah Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	√	√							B
	48	Jumlah Kelompok Penangkar Benih Padi yang terbina	√	√							T
	49	Jumlah kelompok tani yang mengembangkan tanaman pekarangan	√	√							B
	50	Jumlah Desa Yang Menerapkan P2L									B
<b>2</b>		<b>Bidang Peternakan</b>									
	51	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	√								T
	52	Penguatan Kelembagaan Veteriner (Jumlah Klp. Yang Diintervensi)					√				T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
53	Banyaknya Inseminasi, Akseptor, Konsepsi, Jumlah Kelahiran dan Kematian Pada Ternak Sapi Kegiatan Inseminasi Buatan Dirinci Per Kecamatan						√	B	
54	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	√						B	
55	Jumlah inseminasi buatan	√	√					B	
56	Jumlah Jenis Pakan Ternak	√	√					B	
57	Luas Areal Hijauan Pakan Ternak menurut Jenisnya						√	T	
58	Jumlah Produksi Limbah Industri Pertanian sebagai Sumber Pakan						√	B	
59	Jumlah Produksi Jerami sebagai Sumber Pakan						√	B	
60	Jumlah Produksi Daging ,Kulit dan Telur menurut Kecamatan dan Jenis Ternak						√	T	
61	Jumlah jenis Peredaran Pakan di Kabupaten Polewali Mandar						√	T	
62	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	√						B	
63	Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani	√						Tr	
64	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	√						Tr	
65	Jumlah populasi hewan yang sejahtera (Penyelamatan Betina Produktif)	√						T	
66	Jumlah Jenis Sarana Kesehatan Hewan	√	√					T	
67	Jumlah Jenis Layanan Jasa Medik Veteriner	√	√					T	
68	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)						√	Tr	
69	Jumlah dan Jenis Vaksinasi Yang Dilakukan						√	B	
70	Jumlah Pematangan Ternak Menurut Jenisnya dan Lokasi Pematangannya Dirinci Per Kecamatan						√	B	
71	Jumlah Rumah Potong Hewan yang terbangun	√	√					s	
72	Jumlah Ternak yang Keluar & Masuk ke Kab Polewali Mandar						√	√	B
73	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran Ternak						√	B	
74	Jumlah Populasi Sapi	√						B	
75	Jumlah Populasi Kambing	√						B	
76	Jumlah Populasi Unggas	√						B	
77	Jumlah Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	√						B	
78	Jumlah ternak Sapi dan Kambing	√	√					B	
79	Jumlah unit usaha ternak sapi yang berkembang	√	√					B	
80	Jumlah Ternak Betina Produktif yang terlindungi	√	√					B	
81	Jumlah Populasi Ternak Besar						√	√	B
82	Jumlah Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan						√	√	B
83	Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan						√	√	B
84	Jumlah Penyebaran Ternak Pemerintah						√	√	B
85	Jumlah Asuransi Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K)						√	√	Tr
86	Jumlah Klaim Peserta Asuransi Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K)						√	√	Tr

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	87	Jumlah dan Jenis Ternak Yang Disembelih di RPH							√	
3		<b>Bidang Perkebunan</b>								
	88	Optimasi Kelapa Sawit Rakyat					√			T
	89	Perkembangan Harga Pasar Komoditi Perkebunan							√	B
	90	Luas Areal Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar								B
	91	Luas Areal (Ha) Serangan hama PBK Tanaman Kakao							√	B
	92	Luas Areal (Ha) serangan penyakit Helopeltis Sp Tanaman Kakao							√	B
	93	Luas areal (Ha) serangan hama Tikus Tanaman Kakao							√	B
	94	Luas areal (Ha) serangan penyakit VSD Tanaman Kakao							√	B
	95	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Busuk Buah Tanaman Kakao							√	B
	96	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Kangker Batang Tanaman Kakao							√	B
	97	Luas Areal (Ha) Serangan Hama Penggerek Batang Tanaman Kakao							√	B
	98	Luas Areal (Ha) Serangan Hama Oryctes Sp Tanaman Kelapa							√	B
	99	Luas Areal (Ha) Serangan Hama Tupai Tanaman Kelapa							√	B
	100	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Bubuk Buah Kopi Tanaman Kopi							√	B
	101	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Busuk Pangkal Tanaman Lada							√	B
	102	Kawasan Kakao								
	103	Kawasan Kopi								
	104	Kawasan Sagu						√		T
	105	Kawasan Kelapa						√		T
	106	Kawasan Karet						√		T
	107	Kawasan Tebu						√		T
108	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh						√		T	
109	Jumlah Kelompok Usaha Kopra							√	T	
110	Jumlah Kelompok Usaha Minyak Kelapa							√	T	
111	Jumlah Kelompok Usaha Kakao							√	T	
112	Jumlah Kelompok Usaha Arang Tempurung							√	T	
113	Jumlah Kelompok Usaha Kopi							√	T	
114	Jumlah Kelompok Usaha Gula Merah							√	T	
115	Jumlah produksi Kakao	√							B	
116	Jumlah produksi Kelapa	√							B	
117	Jumlah Produksi Kopi	√							B	
118	Jumlah bibit tanaman kakao yang disambung pucuk	√	√						B	
119	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar								B	
120	Jumlah Pengadaan Pestisida (Perkebunan)	√	√						B	
121	Jumlah Kelompok tani perkebunan yang terlatih	√	√						T	

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD		
4	122	Jumlah Kelompok usaha kakao yang terlatih	√	√						T
		<b>Bidang Pengembangan SDM</b>								
	123	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik	√							T
	124	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	√							T
	125	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	√							T
	126	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota			√					T
	127	Peningkatan Kinerja Penyuluh di Kostratani (Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Pelatihan Tematik)					√			T
	128	Penerbitan izin usaha pertanian			√					B
	129	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli dan Terampil	√							T
	130	Jumlah Penyuluh pertanian yang terlatih	√	√						T
	131	Jumlah Penyuluh yang dibayarkan honorinya	√	√						T
	132	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian berdasarkan Diklat Fungsional yang Diikuti							√	T
	133	Jumlah Tenaga Penyuluh berdasarkan Wilayah Kecamatan							√	T
	134	Jumlah Penyuluh Pertanian Berdasarkan Status Kepegawaian (PNS, PPPK,PTT)							√	T
	135	Jumlah kelompok tani yang telah dinilai	√	√						T
	136	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk	√	√						T
	137	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Kelas Kelompok							√	T
	138	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)							√	T
	139	Jumlah Kelembagaan Ekonomi menurut kecamatan, jumlah dan bentuk kelembagaannya							√	T
140	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	√							T	
141	Jumlah Jenis sarana penyuluhan	√	√						T	
142	Jumlah Sarana Prasarana Penyuluhan							√	T	
143	Jumlah balai penyuluh di kecamatan yang terbangun/terehabilitasi	√	√						S	
5		<b>Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian</b>								
	144	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	√							T
	145	Persentase prasarana yang digunakan			√					T
	146	Optimasi Lahan Pertanian (Bantuan Pupuk)					√			T
	147	Luas alih fungsi lahan						√		
	148	Luas percontakan sawah						√		
	149	Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B								
	150	Perluasan Areal Pertanian/Cetak Sawah (Perluasan Sawah)					√			T
	151	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	√							S
	152	Jumlah Kecamatan yang memiliki peta lahan baku sawah	√	√						S
	153	Jumlah bangunan Prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan	√	√						S
	154	Jumlah Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Yang Dikeluarkan							√	B

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
155	Jumlah Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Perkebunan Yang Dikeluarkan							√	B
156	Jumlah Sarana pertanian yang diberikan (Alasintan)			√					S
157	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan (Unit)			√					S
158	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	√							B
159	Jumlah Peta jaringan Daerah Irigasi	√	√						B
160	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang terbangun	√	√				√		B
161	Jumlah embung yang terbangun	√	√				√		B
162	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	√	√				√		B
163	Jumlah DAM Parit yang terbangun	√	√						B
164	Jumlah Long Storage yang terbangun	√	√						B
165	Jumlah pintu air yang terbangun	√	√						B
166	Jumlah Jembatan tani yang terbangun						√		B
167	Jumlah Kelompok Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)							√	B
168	Jumlah Kelompok P3A, GP3A dan IP3A menurut Kecamatan							√	B
169	Jumlah Asuransi Pertanian							√	B
170	Klaim Asuransi Pertanian							√	B
171	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disebarakan menurut Kecamatan berdasarkan Jenisnya							√	B
172	Jumlah Alat dan Mesin pra Panen Pertanian							√	B
173	Jumlah Penggunaan Pupuk Pada Tanaman Pangan Padi							√	B
174	Jumlah Penggunaan Pupuk Pada Tanaman Palawija							√	B
175	Jumlah Penggunaan Pestisida Pada Tanaman Padi							√	B
176	Jumlah Penggunaan Pestisida Pada Tanaman Palawija							√	B
177	Jumlah Produksi Pupuk Kompos							√	B
<b>6</b>	<b>Bidang Ketahanan Pangan</b>								
178	Indeks Ketahanan Pangan	√							T
179	Skor PPH Ketersediaan	√					√		T
180	Skor PPH Konsumsi	√			√				B
181	Harga Pangan Strategis						√		B
182	Nilai Stabilitas Harga Pangan Strategis						√		B
183	Lumbung Pangan Masyarakat					√			T
184	Pertanian Keluarga/Family Farming					√			T
185	Pertanian Masuk Sekolah					√			T
186	Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan						√		T
187	Persentase daerah rentan rawan pangan	√			√				T
188	Persentase cadangan pangan masyarakat	√							T
189	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	√							B

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
190	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	√		√	√				B
191	Jumlah total Lumbung Pangan Masyarakat	√							B
192	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten	√	√						B
193	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	√	√	√					Tr
194	Jumlah kebijakan penanganan kerawanan pangan	√	√						T
195	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Tangga Rawan pangan	√	√						Tr
196	Jumlah Lumbung pangan yang terbangun	√	√						B
197	Jumlah lantai jemur yang terbangun	√	√						B
198	Jumlah Ketersediaan Pangan berdasarkan Hasil Perhitungan NBM (Neraca Bahan Makanan)							√	B
199	Jumlah Ketersediaan Pangan Strategis							√	B
200	Jumlah Penduduk dan kecamatan Rawan Pangan (SKPG)							√	B
201	Jumlah ketersediaan regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal			√					B
202	Jumlah penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan			√					B
203	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	√							B
204	Jumlah dokumen data konsumsi pangan per kapita per tahun	√	√						B
205	Jumlah Konsumsi Pangan berdasarkan Survey Konsumsi							√	B
206	Jumlah Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di bawah 1400 kkal (Sangat Rawan Pangan)							√	B
207	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			√					B
208	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			√					B
209	Jumlah Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	√							B
210	Jumlah Publikasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	√	√						B
211	Jumlah stok, pasokan dan Harga Pangan yang terkendali	√	√						B
212	Jumlah Pangan yang didistribusikan ke kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar							√	B
213	Jumlah Potensi Penerima Pendistribusian Pangan ke Daerah Rawan Pangan							√	B
214	Jumlah Pasokan Pangan Strategis							√	B
215	Jumlah ketersediaan infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan			√					B
216	Jumlah penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya			√					B
<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Perindustrian</b>								
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	√							T
2	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro	√							T
3	Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	√							T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
	4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja					√		T
	5	Jumlah Kelompok IKM yang mampu meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang berdaya saing	√						T
	6	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana industri yang terbangun	√	√					T
	7	Jumlah kelompok industri kecil yang terlatih	√	√					T
	8	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Kecil menurut Jenis Industri (Non Makanan dan Minuman)					√	√	T
	9	Jumlah Perusahaan pada Industri Kecil Menurut Jenis Industri (Makanan Dan Minuman					√	√	T
	10	Jumlah Tenaga kerja pada industri kecil menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
	11	jumlah nilai produksi pada industri kecil menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
	12	jumlah nilai investasi pada industri kecil menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
	13	jumlah sentra industri mikro, kecil dan menengah menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
	14	Jumlah Nilai Produksi dan Nilai Investasi pada Industri Kecil menurut Jenis Industri (Non Makanan dan Minuman)					√	√	T
	15	jumlah nilai investasi pada industri kecil menurut jenis industri (non makanan dan minuman)					√	√	T
	16	Jumlah Industri Sandang (pemintalan benang pertenunan, pakaian jadi, dll)					√		T
	17	Jumlah Industri Pangan (Makanan, dan Minuman Tradisional)					√		T
	18	Jumlah Industri kerajinan (kayu, rotan, bamboo, gerabah, dll)					√		T
<b>2</b>		<b>Bidang Perdagangan</b>							
	19	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	√						T
	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu			√				T
	21	Persentase penerbitan TDG			√				T
	22	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG			√				T
	23	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya			√				T
	24	Pertumbuhan ekspor non migas					√		T
	25	Daftar Harga Bahan Pokok (Bapok)	√	√					B
	26	Pasar Kecamatan	√	√					T
	27	Pasar Desa						√	T
	28	Jumlah pedagang pasar yang ditingkatkan kompetensinya	√						T
	29	Jumlah Pedagang Pasar						√	T
	30	Jumlah pasar yang diberdayakan	√	√					T
	31	Jumlah sarana pendukung distribusi perdagangan yang disediakan	√						T
	32	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan			√				T
<b>3</b>		<b>Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen</b>							

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD		
	33	Persentase Standarisasi Produk dan Perlindungan Konsumen	√							T
	34	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota			√					T
	35	Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa					√			Tr
	36	Jumlah pelayanan pengaduan konsumen	√	√				√		B
<b>4</b>		<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>								
	37	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	38	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	39	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	40	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	41	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	42	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	43	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			√					T
	44	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	45	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	46	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	47	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	48	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			√					T
	49	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	√							T
	50	Persentase usaha mikro yang memiliki legalitas dan standarisasi usaha	√							T
	51	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)			√					T
	52	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran			√					T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	53	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan			√					T
	54	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			√					T
	55	Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	√	√						T
	56	Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan						√		T
	57	Jumlah Koperasi Per Jenis						√		T
	58	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan toko dan retail modern	√	√						T
	59	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)						√		T
<b>5</b>		<b>UPTD Metrologi</b>								
	60	Persentase pelaksanaan metrologi legal dan penanganan kasus	√							T
	61	Persentase kasus yang tertangani	√	√						T
	62	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	√	√	√					Tr
	63	Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa serta BDKT yang dilakukan	√	√						Tr
	64	Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP						√		Tr
	65	Jumlah Hasil Pengawasan UTTP dan BDKT			√					Tr
<b>DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, ESDM</b>								
	1	Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi								
	2	Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi						√		T
	3	Rata-rata nilai indeks perkembangan 92 kawasan transmigrasi prioritas bidang yang direvitalisasi						√		T
	4	Jumlah Rumah Tangga Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)								T
	5	Jumlah Rumah Tangga Transmigrasi Penduduk Asal (TPA)							√	T
	6	Jumlah Kawasan Transmigrasi			√					T
	7	Jumlah wilayah Penempatan Transmigrasi							√	T
	8	Jumlah Penduduk Transmigrasi							√	T
	9	Luas Pencadangan Areal							√	T
	10	Jumlah data Ukur, Bagi, Lahan							√	T
	11	Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	√							T
	12	Jumlah Dokumen Rencana Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	√							T
	13	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Transmigrasi (RTSP)	√	√						T
	14	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi	√	√						T
<b>2</b>		<b>Bidang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi</b>								
	15	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	√							T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	16	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi yang tertata persebaran penduduknya	√							T
	17	Jumlah KK transmigran yang terbina kesiapan lingkungan hunian	√	√						T
	18	Jumlah warga yang memahami transmigrasi	√	√						T
	19	Jumlah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi dalam kondisi memadai	√	√						T
	20	Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik				√				T
	21	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Dari PLN dan Bukan PLN				√				T
	22	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			√					T
	23	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			√					T
	24	Jumlah Fasilitas Umum								
	25	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi							√	T
	26	Luas Lahan Usaha I							√	T
	27	Luas Lahan Usaha II							√	T
	28	Luas Lahan Pekarangan								
	29	Jumlah Penghasilan Transmigrasi							√	T
	30	Jumlah Penerima Perbekalan							√	T
	31	Jumlah Penerima Bantuan Saprotan							√	T
	32	Jumlah lokasi transmigrasi baru						√		
<b>3</b>		<b>Bidang Tenaga Kerja</b>								
	33	Persentase tenaga kerja yang terserap	√							T
	34	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja			√					T
	35	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster			√					T
	36	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi			√					T
	37	Persentase LPK yang terakreditasi			√					T
	38	Persentase LPK yang memiliki perizinan			√					T
	39	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan			√					T
	40	Persentase penyerapan lulusan			√					T
	41	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			√					T
	42	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)			√					T
	43	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			√					T
	44	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah			√					T
	45	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan			√					T
	46	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan								
	47	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih			√					T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
48	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			√					T
49	Jumlah tenaga kerja terampil	√							T
50	Jumlah Perusahaan dan Jumlah Karyawan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan	√							T
51	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Kompeten	√	√						T
52	Jumlah Calon Tenaga Kerja Terampil	√	√						T
53	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Kerja							√	T
54	Jumlah kegiatan TKM (Tenaga Kerja Mandiri)							√	T
55	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota			√					T
56	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota			√					T
57	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan			√					T
58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan								
59	Jumlah penganggur yang dilatih			√					T
60	Lulusan bersertifikat kompetensi			√					T
61	Jumlah Perusahaan dan Karyawan Yang Telah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS TK	√	√		√				T
62	Jumlah Perusahaan yang telah Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	√	√				√		T
63	Jumlah Informasi pasar kerja							√	T
64	Jumlah pendaftaran ID dan rekomendasi paspor CPMI							√	T
65	Jumlah fasilitasi & mediasi perselisihan hubungan industri							√	T
66	Jumlah PMI dan Lokasi Penempatan							√	T
67	Jumlah Tenaga Kerja Dalam Daerah							√	T
68	Jumlah Tenaga Kerja Asing							√	T
69	Jumlah Tenaga Kerja Usia Muda (15-24 Thn) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan							√	T
70	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Informal Disektor Non Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin				√				T
71	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan & Jenis Kelamin							√	T
72	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Penempatan dan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (PMI)							√	T
73	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan			√					T
74	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			√					T
75	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			√					T
76	Jumlah mogok kerja			√					T
77	Jumlah penutupan perusahaan			√					T
78	Jumlah perselisihan kepentingan			√					T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
79	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			√					T
80	Jumlah perselisihan PHK			√					T
81	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			√					T
82	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			√					T
83	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan			√					T
84	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			√					T
85	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			√			√		T
86	Jumlah pencari kerja yang terserap						√		
87	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			√					T
88	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			√					T
89	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			√					T
90	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			√					T
91	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			√					T
92	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			√					T
93	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan			√					T
94	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja			√					T
95	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya			√					T
96	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk			√					T
97	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri					√			T
98	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak					√			T
99	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.					√	√		T
100	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru					√			T
101	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan					√			T
102	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3					√			T
103	Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)					√			T
104	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK					√			T
105	Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah					√			T
106	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah					√			T
107	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah					√			T
108	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah					√			T
109	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas					√			T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
	110	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan					√		T
	111	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama					√		T
	112	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja					√		T
	113	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan							
	114	Jumlah Lembaga kerja sama tripartit atau dewan pengupahan provinsi dan kab./kota yang telah menjalankan fungsinya					√		T
	115	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit					√		T
	116	Jumlah Unit layanan disabilitas					√		T
	117	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar					√		T
	118	Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja					√		T
	119	Jumlah Perusahaan						√	T
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
<b>1</b>		<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>							
	1	Persentase penanganan kasus konflik batas wilayah yang ditindak lanjuti	√	√					T
	2	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan otonomi daerah	√	√					T
	3	Laporan kordinasi monitoring dan evaluasi pemerintahan kependudukan pemberdayaan masyarakat dan desa	√	√					T
	4	Jumlah dokumen administrasi tata Pemerintahan yang disusun	√	√					T
	5	Jumlah dokumen laporan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat , dan Penanggulangan Bencana	√	√					T
	6	Jumlah dokumen Laporan koordinasi monitoring dan evaluasi kesatuan bangsa dan politik	√	√					T
	7	Jumlah dokumen regulasi Pertanahan, Kesatuan Bangsa, dan Politik	√	√					T
	8	Jumlah dokumen regulasi ketentraman ketertiban perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana	√	√					T
	9	Jumlah dokumen administrasi pemekaran wilayah	√	√					T
	10	Jumlah Dokumen tapal batas wilayah administrasi antar daerah	√	√					T
	11	Jumlah Dokumen Toponimi	√	√					T
	12	Jumlah dokumen LPPD, RLPPD,LKPJ.	√	√					T
	13	Jumlah dokumen laporan pemantauan tahapan pemilu pilkada	√	√					T
	14	Jumlah dokumen standar pelayanan minimal (SPM) Daerah	√	√					T
<b>2</b>		<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>							
	15	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	√						T
	16	Persentase Masyarakat Miskin yang Terfasilitasi	√	√					T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data	
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD		
	17	Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Terfasilitasi	√	√						T
	18	Jumlah Perangkat Rumah Ibadah yang Menerima insentif	√	√						T
	19	Jumlah Perjalanan Ibadah Haji/Umroh yang Terlaksana	√	√						S
	20	Jumlah Penerima Bantuan bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan	√	√						S
	21	Jumlah Calon Jemaah Haji	√	√			√		√	T
	22	Jumlah Insentif Imam dan Perangkat Rumah Ibadah							√	T
	23	Jumlah Organisasi Keagamaan							√	T
	24	Jumlah pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan							√	Tr
	25	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan							√	Tr
	26	Jumlah Pembinaan Pendidikan Keagamaan (MTQ)	√	√						T
	27	Jumlah Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi	√	√						T
	28	Jumlah Mahasiswa Penyelesaian Study, Beasiswa Berprestasi dan Penghafal Al-Quran Bagi Masyarakat Tidak Mampu	√	√						T
	29	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan Sertifikat Mampu Baca Al Quran	√	√						T
	30	Jumlah dokumen regulasi Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	√	√						T
<b>3</b>		<b>Bagian Hukum</b>								
	31	Persentase produk hukum yang harmonis	√							T
	32	Persentase Peraturan Bupati yang ditetapkan	√	√						T
	33	Persentase Surat Keputusan yang ditetapkan	√	√						T
	34	Persentase Peraturan Bupati yang terpublikasi dalam JDIH	√	√						T
	35	Persentase Surat Keputusan yang terpublikasi dalam JDIH	√	√						T
	36	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	√	√						T
	37	Jumlah Surat Edaran							√	Tr
	38	Jumlah Instruksi Bupati								
	39	Jumlah Harmonisasi Produk Hukum							√	T
	40	Jumlah Kasus Pengaduan Perkara Litigasi dan Non Litigasi yang di Fasilitasi	√	√						B
	41	Jumlah Laporan Kabupaten Peduli HAM dan Laporan Aksi HAM	√	√						T
	42	Jumlah Peraturan Daerah yang terpublikasi dalam JDIH	√	√						T
<b>4</b>		<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>								
	43	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat	√							T
	44	Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun	√	√						T
	45	Jumlah dokumen fasilitasi Program Pembangunan yang tersusun	√	√						T
	46	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	47	Jumlah Dokumen Laporan hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	√	√						T
	48	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perencanaan Program Pembangunan Daerah							√	T
	49	Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah							√	Tr
	50	Jumlah pemantauan dan evaluasi TEPPRA							√	Tr
	51	Jumlah pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan							√	T
	52	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah							√	T
	53	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah							√	T
	54	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah							√	T
<b>5</b>		<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>								
	55	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	√							T
	56	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi	√	√						Tr
	57	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konsultan	√	√						Tr
	58	Jumlah paket pekerjaan Penyedia Barang	√	√						Tr
	59	Jumlah paket pekerjaan Jasa Lainnya	√	√						Tr
	60	Jumlah dokumen rekomendasi Pemanfaatan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	√	√						T
	61	Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang secara Elektronik								T
	62	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik								T
	63	Jumlah pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik								Tr
	64	Jumlah Katalog Elektronik Lokal/ Sektoral								Tr
	65	Jumlah peserta/orang pembinaan/advokasi pengadaan barang dan jasa	√	√						T
	66	Jumlah peserta bimbingan teknis, pendampingan, dan /atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP								T
	67	Jumlah Personil UKPBJ								T
	68	Jumlah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi								T
<b>6</b>		<b>Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam</b>								
	69	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	√							T
	70	Persentase pemantauan kebijakan terkait SDA yang tepat waktu	√							T
	71	Jumlah Dokumen Regulasi Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,UKM dan ESDM	√	√						T
	72	Jumlah Dokumen Regulasi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√						T
	73	Jumlah Dokumen Regulasi Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah	√	√						T
	74	Jumlah dokumen laporan Akses Keuangan Daerah yang Tersusun	√	√						T
	75	Jumlah Dokumen Inflasi Yang Tersusun	√	√						T
	76	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perindustrian	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	
77	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perdagangan	√	√						T
78	Jumlah Kebijakan daerah tentang Koperasi	√	√						T
79	Jumlah Kebijakan daerah tentang UKM	√	√						T
80	Jumlah Kebijakan daerah tentang ESDM	√	√						T
81	Jumlah Kebijakan daerah tentang Pertanian							√	T
82	Jumlah Kebijakan daerah tentang Pangan							√	T
83	Jumlah Kebijakan daerah tentang Kelautan dan Perikanan							√	T
84	Jumlah Kebijakan daerah tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan							√	T
85	Jumlah Kebijakan daerah tentang Pendapatan							√	T
86	Jumlah Kebijakan Kebijakan daerah tentang Penanaman Modal							√	T
87	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perijinan							√	T
88	Jumlah Kebijakan daerah tentang Badan Usaha Daerah							√	T
89	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perindustrian	√	√						T
90	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Koperasi							√	T
91	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi UKM							√	T
92	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi ESDM							√	T
93	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pertanian							√	T
94	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pangan							√	T
95	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Kelautan dan Perikanan							√	T
96	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan							√	T
97	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pendapatan							√	Tr
98	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Penanaman Modal							√	Tr
99	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perijinan							√	Tr
100	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Usaha Daerah							√	Tr
101	Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perdagangan							√	Tr
102	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Yang Tersusun	√	√						T
103	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,UKM, dan ESDM yang tersusun	√	√						T
104	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Momitoring dan Evaluasi Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang Tersusun	√	√						T
105	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan BUD yang tersusun	√	√						T
<b>7</b>	<b>Bagian Organisasi</b>								
106	Indeks Reformasi Birokrasi	√							T
107	Persentase perangkat daerah dengan predikat reformasi birokrasi baik	√							T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	108	Jumlah Jenis Dokumen Penataan Kelembagaan	√	√						T
	109	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	√	√						T
	110	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	√	√						T
	111	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi	√	√						T
	112	Jumlah Dokumen Inovasi Pelayanan Publik	√	√						T
	113	Jumlah Dokumen Penilaian Pelayanan Publik	√	√						T
	114	Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis Yang Tersusun	√	√						T
	115	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	√	√						T
	116	Jumlah Dokumen Kebijakan Naskah Dinas Yang Tersusun	√	√						T
	117	Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar	√	√						T
	118	Jumlah Dokumen Cascading Kinerja Perangkat Daerah	√	√						T
	119	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perangkat Daerah Yang Tersusun	√	√						T
	120	Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	√	√						T
	121	Jumlah Dokumen Laporan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	√	√						T
	122	Jumlah Dokumen PMPRB Yang Tersusun	√	√						T
	123	Jumlah dokumen Budaya Kerja Aparatur							√	T
	124	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							√	T
	125	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah							√	T
	126	Jumlah Jabatan							√	T
	127	Jumlah Kelas dan Nilai Jabatan							√	T
	128	Jumlah Indikator Kinerja Utama OPD							√	T
	129	Jumlah OPD Yang Memiliki Standar Pelayanan Publik Partisipatif	√	√						T
	130	Jumlah OPD Yang Dilengkapi SOP	√	√						T
	131	Jumlah Perangkat Daerah Yang Layak Diusulkan Sebagai Perangkat Daerah Zona WBK	√	√						T
<b>8</b>		<b>Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</b>								
	132	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	√							T
	133	Jumlah kunjungan kerja	√							B
	134	Jumlah rapat koordinasi unsur pejabat pemerintah daerah dan FORKOPIMDA	√	√						B
	135	Jumlah media massa yang aktif memanfaatkan informasi pemerintah daerah dan jenis penyelenggaraan informasi Daerah	√	√						T
	136	Jumlah Tim Keprotokolan Daerah							√	T
	137	Jumlah Tamu Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokoleran							√	B
	138	Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokoleran							√	B
	139	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan kepada Awak Media							√	T
	140	Jumlah Pewarta							√	T
	141	Jumlah Upacara Hari Besar Nasional							√	T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data		
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD	
	142	Jumlah hari Besar Keagamaan							√	T	
9		<b>Bagian Umum</b>									
	143	Jumlah pegawai Sekretariat Daerah							√	T	
	144	Jumlah dokumen Persuratan							√	T	
	145	Jumlah dokumen Kinerja Program dan Kegiatan Setda							√	T	
	146	Jumlah dokumen Kinerja Keuangan Setda							√	T	
	147	Jumlah dokumen Renstra Setda							√	T	
	148	Jumlah dokumen Renja Setda							√	T	
	149	Jumlah dokumen RKA Setda							√	T	
	150	Jumlah sarana prasarana Ruman Jabatan							√	T	
	151	Jumlah tenaga Pelayanan rumah jabatan							√	T	
	152	Jumlah barang Inventaris Setda							√	T	
153	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Setda							√	T		
<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>											
1		<b>Bagian Umum</b>									
	1	Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√								T
	2	Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin							√		T
	3	Jumlah layanan kesekretariatan yang tersedia untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD	√	√							T
2		<b>Bagian Risalah dan Persidangan</b>									
	4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu	√								T
	5	Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√								T
	6	Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√								T
	7	Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√								T
	8	Jumlah rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani	√	√							S
	9	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang pemerintahan dan hukum	√	√							S
	10	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur	√	√							S
	11	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat	√	√							S
	12	Jumlah layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang perekonomian	√	√							S
	13	Jadwal Persidangan							√		S
	14	Jumlah Rekapitulasi Kegiatan Rapat DPRD							√		S
	15	Jumlah rapat dan sidang pembahasan rancangan PERDA yang terlayani	√	√							T
	16	Jumlah PERDA ditetapkan	√	√							T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	17	Jumlah Rancangan Perda ditetapkan	√	√						T
	18	Jumlah Rekapitulasi Produk Hukum DPRD						√		T
	19	Jumlah Keputusan menurut Jenis Keputusan DPRD						√		T
<b>3</b>		<b>Bagian Hubungan Masyarakat</b>								
	20	Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√							T
	21	Jumlah Kunjungan kerja Anggota DPRD yang terlayani	√	√						B
	22	Jumlah kegiatan reses yang terlayani	√	√						B
	23	Jumlah Penerimaan Aspirasi Masyarakat ke DPRD						√		B
	24	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang ditindak Lanjuti						√		B
	25	Jumlah kegiatan DPRD yang terdokumentasi dan terpublikasi	√	√						B
<b>BALITBANGREN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>								
	1	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	√					√		T
	2	Persentase Konsistensi sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√					√		T
	3	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√					√		T
	4	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√					√		T
	5	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan						√		T
	6	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan						√		T
	7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		√				√		T
	8	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		√				√		T
	9	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		√				√		T
	10	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		√				√		T
	11	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		√				√		T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	12	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		√				√		T
	13	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		√				√		T
2		<b>Bidang Ekonomi</b>								
	14	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	√					√		T
	15	Persentase Konsistensi sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√					√		T
	16	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√					√		T
	17	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√					√		T
	18	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang ekonomi						√		T
	19	Persentase penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan						√		T
	20	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		√				√		T
	21	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		√				√		T
	22	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		√				√		T
	23	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		√				√		T
	24	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		√				√		T
	25	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		√				√		T
	26	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√						T
27	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		√						T	
28	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		√				√		T	
3		<b>Bidang Sosial Budaya</b>								
	29	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	√					√		T
	30	Persentase Konsistensi sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√					√		T

No.	Daftar Data	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	Usulan OPD	
31	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√					√		T
32	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√					√		T
33	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang sosial budaya						√		T
34	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan						√		T
35	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		√				√		T
36	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ppemerintahan		√				√		T
37	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		√				√		T
38	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		√				√		T
39	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		√				√		T
40	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		√				√		T
41	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		√				√		T
42	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		√						T
43	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		√						T
44	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		√						T
<b>4</b>	<b>Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program</b>								
45	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	√					√		T
46	Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	√					√		T
47	Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	√					√		T
48	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan						√		T
49	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah						√		T
50	Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan						√		T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	51	Jumlah laporan hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		√				√		T
	52	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		√				√		T
	53	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		√				√		T
	54	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		√				√		T
	55	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		√				√		T
	56	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		√				√		T
	57	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)		√				√		T
	58	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		√				√		T
	59	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		√				√		T
	60	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		√				√		T
	61	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		√				√		T
<b>5</b>		<b>UPTD AGRO TECHNO PARK</b>								
	62	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√							
	63	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan						√		T
	64	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						√		T
<b>BADAN KEUANGAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Anggaran</b>								
	1	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	√							T
	2	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu	√							T
	3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD					√			T
	4	Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Pokok						√		T
	5	Pagu Anggaran Belanja Daerah Pokok						√		T
	6	Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah Pokok								
	7	Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan						√		T
	8	Pagu Anggaran Belanja Daerah Perubahan						√		T
	9	Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah Perubahan								
	10	Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Revisi								B
	11	Pagu Anggaran Belanja Daerah Revisi								B
	12	Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah Revisi								

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	13	Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	14	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	15	Jumlah Dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPA-P yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	16	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu						√		T
	17	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu						√		T
	18	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting	√	√						T
	19	Jumlah Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan						√		T
	20	Jumlah Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pokok						√		T
<b>2</b>		<b>Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan</b>								
	21	Persentase pencairan belanja tepat waktu	√							B
	22	Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu	√							B
	23	Jumlah Laporan Kas Daerah sesuai standar dan prosedur	√	√						B
	24	Jumlah Jenis Dana Transfer yang di Kelola sesuai standar dan prosedur	√	√						B
	25	Jumlah Daftar Gaji Perangkat Daerah yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	√	√						B
	26	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur	√	√						B
	27	Jumlah Rekomendasi SPM yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	√	√						B
	28	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√						T
	29	Jumlah Realisasi DAK						√		Tr
	30	Jumlah SP2D yang Terbit						√		B
<b>3</b>		<b>Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>								
	31	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	√							T
	32	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	√							T
	33	Jumlah dokumen akuntansi keuangan daerah diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	34	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi keuangan sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	35	Jumlah Pejabat Akuntansi dan Pelaporan yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	√	√						T
	36	Jumlah Realisasi Pendapatan						√		B
	37	Jumlah Realisasi Belanja						√		B
	38	Jumlah Realisasi Pembiayaan						√		B
	39	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√	√						Tr
	40	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√	√						Tr
	41	Jumlah Rancangan Perda Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	42	Jumlah Utang Kabupaten Polewali Mandar							√	T
	43	Jumlah Piutang Kabupaten Polewali Mandar								
	44	Jumlah Ekuitas Kab. Polewali Mandar							√	T
	45	Jumlah Penyertaan Modal Kab. Polewali Mandar								
<b>4</b>		<b>Bidang Aset</b>								
	46	Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar	√							T
	47	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola BMD	√							T
	48	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	49	Jumlah Regulasi Standar Satuan Harga yang Tersusun sesuai standar dan prosedur	√	√						T
	50	Jumlah Aset Kabupaten Polewali Mandar								
	51	Jumlah Rekapitulasi Barang ke Neraca							√	T
	52	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilengkapi administrasi penilaian sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	53	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan BMD sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	54	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aset/ Barang Milik Daerah sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	55	Jumlah Laporan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dilengkapi administrasi Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai standar dan prosedur	√	√						T
	56	Jumlah Laporan Penjualan Barang Milik Daerah yang dilengkapi administrasi Penjualan Barang Milik Daerah sesuai standar dan prosedur	√	√						T
	57	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah sesuai standar dan tepat waktu	√	√						T
	58	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi					√			T
<b>BADAN PENDAPATAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Perencanaan, Perhitungan Dan Penetapan Pendapatan</b>								
	1	Jenis penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah							√	T
	2	Jumlah penerimaan Pajak Daerah	√							B
	3	Jumlah Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	√	√						T
	4	Jumlah Rencana Anggaran Pendapatan	√	√						T
	5	Jumlah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah							√	T
	6	Jumlah Pengembangan Potensi Pendapatan							√	T
	7	Jumlah Pemutakhiran Pajak Bumi Bangunan (PBB)							√	B
	8	Jumlah Pendistribusian SPPT, DHKP, PBB							√	T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	9	Jumlah Sistem Pajak Daerah yang berfungsi secara optimal	√	√						T
	10	Jumlah Pendukung Sistem Informasi Pendapatan						√		T
	11	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan						√		T
<b>2</b>		<b>Bidang Penagihan I</b>								
	12	Jumlah Obyek dan Subyek Pajak Restoran dan Parkir						√		B
	13	Jumlah Pengawasan Pajak Restoran dan Parkir						√		B
	14	Jumlah Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Restoran dan Parkir						√		B
	15	Jumlah Obyek dan Subyek Pajak Reklame dan Hiburan								B
	16	Jumlah Penertiban Pajak Reklame dan Hiburan						√		B
	17	Jumlah Obyek dan Subyek Pajak Hotel & Sarang Burung Walet						√		B
	18	Jumlah Pengawasan Pajak dan Hotel Sarang Burung Walet						√		B
	19	Jumlah Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet						√		B
	20	Jumlah Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Hiburan								B
<b>3</b>		<b>Bidang Penagihan II</b>								
	21	Jumlah basis data pajak dan retribusi daerah yang telah dimutakhirkan	√	√						T
	22	Jumlah Wajib Pajak menurut Kecamatan						√		T
	23	Jumlah wajib pajak yang taat bayar pajak	√							B
	24	Jumlah penerimaan Retribusi Daerah	√							B
	25	Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat penerimaannya	√							T
	26	Jumlah wajib retribusi daerah yang memahami kewajiban membayar retribusi daerah	√	√						B
	27	Jumlah Penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menurut Kecamatan						√		T
	28	Jumlah Subyek dan Obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB) menurut Kecamatan						√		T
	29	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah						√		T
	30	Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)						√		T
	31	Jumlah Wajib Pajak BPHTB						√		T
	32	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah						√		B
	33	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)						√		B
	34	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB						√		B
	35	Jumlah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya						√		B
	36	Jumlah Jenis Alat Pungut Retribusi Daerah						√		T
	37	Jumlah Penyaluran Barang Kuasi						√		T
<b>4</b>		<b>Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan Dan Pelaporan</b>								
	38	Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	√							T
	39	Jumlah Peraturan Daerah						√		T
	40	Jenis Pajak yang Telah Disosialisasikan						√		T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	41	Jumlah Wajib Pajak yang terpantau realisasi penerimaannya	√							T
	42	Jumlah Pajak Daerah						√		T
	43	Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Telah Dilakukan Pengawasan						√		B
	44	Jumlah Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	√	√						B
	45	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah						√		B
<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Pegawai</b>								
	1	Indeks Profesionalitas Aparatur	√							T
	2	Jumlah Dokumen Formasi Pegawai	√	√						T
	3	Jumlah CPNS dan PPPK yang lulus dalam tes pengadaan CPNS dan PPPK	√	√						T
	4	Jumlah Sistem informasi Kepegawaian yang dikembangkan	√	√						T
	5	Jumlah perangkat daerah yang telah optimal dalam pengelolaan data kepegawaian	√	√						T
	6	Jumlah Data ASN yang valid dan up to date	√	√						T
	7	Jumlah administasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang tertib	√							T
	8	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan						√		T
	9	Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural						√		T
	10	Jumlah PNS Per OPD						√	√	T
	11	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Ruang						√		T
	12	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan						√		T
	13	Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural						√		T
	14	Jumlah ASN dengan penilaian kinerja Baik	√							T
	15	Jumlah perangkat daerah yang telah tertib dalam penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	√	√						T
	16	Jumlah ASN yang berprestasi yang menerima Penghargaan	√	√						T
	17	Jumlah laporan disiplin ASN	√	√						T
	18	Jumlah kasus pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	√	√						T
	19	Jumlah Wajib Lapo LHKPN						√		T
	20	Jumlah 'Wajib Lapo LHKASN						√		T
<b>2</b>		<b>Bidang Administrasi Kepegawaian</b>								
	21	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi jabatan	√							T
	22	Total Jabatan						√		T
	23	Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi sesuai standar dan prosedur	√							T
	24	Jumlah Layanan Administrasi Mutasi ASN yang tertib	√	√						T
	25	Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi terbuka pengisian JPT	√	√						T
	26	Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian						√		S
	27	Jumlah SK kenaikan pangkat yang memenuhi ketentuan dan diserahkan tepat waktu	√	√						S

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	28	Jumlah PNS yang diusulkan memperoleh syarat kenaikan pangkat	√	√						T
	29	Jumlah PNS yang Ditempatkan dan diangkat dalam jabatan baru						√		T
	30	Jumlah Data kenaikan pangkat periode April dan Oktober						√		S
	31	Jumlah Data jabatan Fungsional Tertentu						√		T
<b>3</b>		<b>Bidang Pendidikan dan Pelatihan</b>								
	32	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Teknis	√							T
	33	Jumlah ASN yang telah memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional	√							T
	34	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	√	√						T
	35	Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim dan Diklat Fungsional	√	√				√		T
	36	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS						√	√	T
	37	Jumlah dokumen Rencana pengembangan kompetensi	√	√						T
	38	Jumlah ASN yang mengikuti ujian Dinas dan Ujian Penyusaian ijazah	√	√						T
	39	Jumlah ASN yang mengikuti Tugas belajar dan Izin Belajar	√	√				√		T
	40	Jumlah ASN yang berkembang dalam jabatan Fungsional	√	√						T
	41	Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH					√			T
	42	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada					√			T
<b>INSPEKTORAT</b>										
<b>1</b>		<b>Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan</b>								
	1	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	√							T
	2	Kapabilitas APIP								T
	3	Audit BumDes	√							T
	4	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	√							T
	5	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√	√						T
	6	Jumlah rekomendasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	√	√						B
	7	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	√	√						T
	8	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	√	√						T
	9	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa	√	√						T
	10	Jumlah Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	√	√						T
	11	Jumlah Obyek Reviu atas data dan dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)						√		B
	12	Jumlah Obyek Audit Keuangan dan Aset						√		B
	13	Jumlah Obyek Evaluasi LAKIP						√		B
	14	Jumlah Obyek Evaluasi Reformasi Birokrasi						√		B

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
2	15	Jumlah Obyek Evaluasi Maturitas SPIP							√	B
		<b>Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>								
	16	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	√	√					√	T
	17	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√	√					√	T
	18	Jumlah Monitoring Vaksin	√	√					√	B
	19	Jumlah Obyek yang diaudit Opname Kas dan Persediaan	√	√					√	B
	20	Jumlah Obyek Reviu atas pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)	√	√					√	B
	21	Jumlah Objek yang diaudit Kinerja	√	√					√	B
	22	Jumlah Objek yang diaudit Ketaatan	√	√					√	B
	23	Jumlah Objek Audit Pendapatan	√	√					√	B
24	Jumlah Objek Probitiy Audit	√	√					√	B	
3		<b>Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan</b>								
	25	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	√	√						T
	26	Jadwal Obyek Reviu atas dana alokasi khusus (DAK)	√	√						B
	27	Reviu SSH, ASB, dan HSPK	√	√						T
	28	Reviu Penanganan Dampak Inflasi	√	√						B
	29	Reviu Laporan Keuangan Kabupaten	√	√						B
	30	Reviu RKA Pokok OPD	√	√						T
	31	Reviu RKPD Perubahan	√	√						T
	32	Reviu RKA Perubahan OPD	√	√						T
	33	Reviu KUA PPAS	√	√						T
	34	Reviu UKPBJ	√	√						T
	35	Reviu P3DN	√	√						T
	36	Reviu HPS bersama UKPBJ	√	√						T
	37	Reviu Renja OPD	√	√						T
	38	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√	√					√	T
	39	Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	√	√						T
	40	Jumlah Obyek Reviu atas dokumen rancangan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD)	√	√						B
41	Jumlah Obyek Evaluasi Penyerapan Anggaran	√	√						B	
4		<b>Inspektur Pembantu Bidang Investigasi</b>								
	42	Pemeriksaan/Audit Investigasi	√	√						B
	43	Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	√	√					√	B
	44	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	√	√						B
	45	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Bidang Pencegahan Korupsi	√	√						B
46	Penanganan Pengaduan yang berindikasi terjadi Kerugian Keuangan Negara	√	√						B	

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	47	Pemberian keterangan ahli di persidangan	√	√					√	T
	48	Telaah sejawad	√	√						T
	49	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√	√						T
	50	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara	√	√						T
	51	Jumlah Obyek Pengawasan Khusus (Tergantung Pengaduan)	√	√					√	B
	52	Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi	√	√						B
	53	Saber Pungli	√	√						B
	54	Jumlah Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	√	√						T
	55	Jumlah kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	√	√					√	T
	56	Jumlah aparaturnya yang telah menandatangani fakta integritas	√	√						T
	57	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	√	√						T
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
<b>1</b>		<b>Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>								
	1	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat (Makro)	√							T
	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	√							T
	3	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	√							T
	4	Jumlah kebijakan teknis	√							T
	5	Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan	√	√						T
	6	Jumlah Forum Kerukunan Ummat beragama	√	√						T
	7	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Wawasan Kebangsaan	√	√						T
	8	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian							√	B
	9	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Kegiatan							√	B
	10	Jumlah Peningkatan Toleransi Intra dan Antar Ummat Beragama	√	√						T
	11	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Minuman Keras	√	√						T
	12	Jumlah Kasus Narkoba							√	B/Tr
	13	Jumlah Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba							√	Tr
	14	Indeks pemahaman politik masyarakat	√							T
	15	Jumlah Pemuda pengibar bendera merah putih							√	
<b>2</b>		<b>Bidang Politik Dalam Negeri</b>								
	16	Jumlah Kebijakan Teknis	√							T
	17	Jumlah partai politik yang menerima bantuan keuangan parpol sesuai standar prosedur berlaku	√	√						T

No.	Daftar Data		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD		Usulan OPD
	18	Jumlah Laporan pemantauan perkembangan politik di daerah yang lengkap dan akurat	√	√						T
	19	Jumlah Partai Politik						√		T
	20	Jumlah Pemilih						√		T
	21	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik						√		T
	22	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi/Verifikasi Tata Kelola Bantuan Keuangan Parpol	√	√						T
	23	Jumlah Bantuan Keuangan partai Politik	√	√						T
	24	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan Politik						√		T
<b>3</b>		<b>Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional</b>								
	25	Persentase potensi konflik yang tertangani	√							T
	26	Persentase LSM aktif					√			T
	27	Jumlah kebijakan teknis	√							T
	28	Jumlah Ormas yang diawasi	√	√						Tr
	29	Jumlah Ormas yang mengikuti Sosialisasi	√	√						T
	30	Jumlah Yayasan Yang Terdaftar						√		T
	31	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Terdaftar						√		T
	32	Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)						√		T
	33	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)						√		T
	34	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)						√		T
	35	Jumlah Konflik Sosial yang tertangani	√	√						Tr
	36	Jumlah Forum Kordinasi Pimpinan Daerah	√	√						T
	37	Jumlah Peserta Sosialisasi Character Building	√	√						T
	38	Jumlah Potensi Konflik yang terdeteksi	√	√						T
	39	Jumlah Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap dan Pemegang Izin Tinggal Terbatas						√		T
	40	Jumlah Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Sosial						√		T

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Juni 2023

